

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

Balai POM di Dumai



2025

s/d

2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DUMAI
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
DUMAI
NOMOR HK.02.02.21B.12.25.91 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI DUMAI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Dumai tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

- Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI DUMAI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI DUMAI TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Dumai Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Dumai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Dumai memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Dumai untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Dumai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
a. acuan bagi Balai POM di Dumai dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Dumai.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 05 Desember 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI DUMAI,



EMI AMALIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI DUMAI
NOMOR HK.02.02.21B.12.25.91 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI DUMAI TAHUN 2025 – 2029

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat telah mendorong peningkatan konsumsi produk obat dan makanan secara signifikan. Masyarakat kini semakin mudah mengakses informasi mengenai obat dan makanan melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial. Namun, di sisi lain, literasi masyarakat terhadap keamanan, khasiat, dan mutu produk yang mereka konsumsi masih belum optimal. Hal ini menyebabkan masih banyak ditemukan penggunaan obat dan makanan yang tidak tepat, tidak aman, dan berisiko bagi kesehatan.

B POM memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia melalui pengawasan terhadap obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kawasan perbatasan. Dalam penguatan sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam Asta Cita, yang mencakup pembangunan sistem ketahanan kesehatan nasional dan perlindungan terhadap rakyat dari produk berbahaya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, B POM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Balai POM di Dumai bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat pada wilayah kerja pengawasannya. Hal ini

tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PerBPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Dumai sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai POM di Dumai menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 10) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Balai POM di Dumai memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di wilayahnya memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang telah ditetapkan. Dengan cakupan pengawasan yang meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir, Balai POM bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan pre-market dan post-market untuk melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong daya saing industri farmasi dan pangan nasional.

Balai POM di Dumai beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut Balai POM di Dumai untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

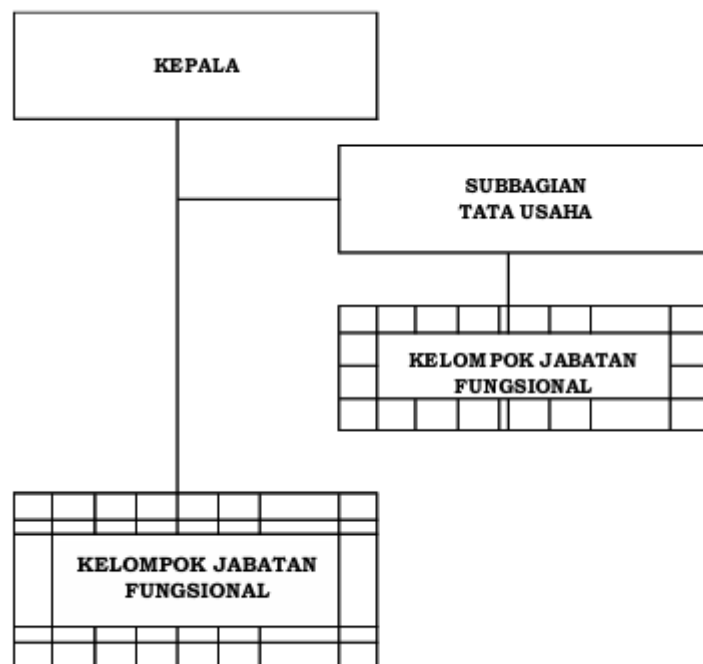
Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Dumai untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra Balai POM di Dumai dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan Balai POM di Dumai untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Dumai untuk periode 2025-2029. Renstra Balai POM di Dumai disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM. Renstra Balai POM di Dumai 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai POM di Dumai bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

Struktur organisasi Balai POM di Dumai telah diatur dalam Lampiran III Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM

Sesuai Perpres No 80 Tahun 2017 tentang BPOM, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan upaya strategis guna mendukung pembangunan kesehatan dalam rangka melindungi bangsa Indonesia

dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang bermutu, aman dan berkhasiat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM perlu perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan obat dan makanan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Dumai, perlu perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN dan analisis beban kerja, Balai POM di Dumai membutuhkan pegawai sebanyak 36 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 26 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 10 orang.

Pegawai Balai POM di Dumai saat ini yang eksisting adalah sebagai berikut.

No	Jabatan	Jenis	Jumlah Pegawai
1	Kepala Balai POM di Dumai	Struktural	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Dumai	Struktural	1
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	1
6	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	1
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	3
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	11
12	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1
14	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1
16	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1
17	Pelaksana	Pelaksana	1
18	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	3
19	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	1
Total Pegawai			26

Kebutuhan pegawai Balai POM di Dumai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) pada aplikasi SIRENPOM tahun 2025 ada 36 orang dengan rincian sebagai berikut.

No	Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai POM di Dumai	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Dumai	Struktural	1	1	0	100%
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	2	1	1	50%
4	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
5	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
6	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	8	3	5	37,5%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	13	11	2	85%
9	Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
10	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
11	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
12	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
13	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
14	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
15	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
16	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
17	Pelaksana	Pelaksana	0	1	-1	100%
18	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	3	-3	100%
19	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	0	1	-1	100%

Berdasarkan data kepegawaian pegawai Balai POM di Dumai terdiri dari 9 pegawai laki-laki (35%) dan 17 pegawai perempuan (65%). Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai BPOM memiliki tingkat pendidikan S1 sejumlah 12 pegawai (46%), diikuti Profesi sebanyak 7 pegawai (27%), untuk S2 sejumlah 1 pegawai (4%), dan tingkat D3/DIV sebanyak 6 pegawai (23%).

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan Human Capital dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan

karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya.

1.1.1. CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI DUMAI 2020 - 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan kegagalan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Balai POM di Dumai. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Indikator Kinerja Balai POM di Dumai Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Dumai															
Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	69,17	85,61%	83,60	72,00	86,12%	86,60	80,06	92,45%	90,00	89,12	99,02%	89,20	89,91	100,80%
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	73,74	94,54%	80,00	78,74	98,43%	82,00	76,72	93,56%	84,00	80,74	96,12%	80,80	85,12	105,35%
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	66,67	83,34%	73,00	67,94	93,07%	74,00	72,31	97,72%	75,00	86,82	115,76%	86,90	89,06	102,49%
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	94,74	126,32%	94,00	79,31	84,37%	95,00	68,57	72,18%	96,00	66,67	69,45%	67,62	70,59	104,39%
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Dumai															
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,00	95,50	112,35%	96,00	97,78	101,85%	97,00	100,69	103,80%	99,00	100,00	101,01%	100,00	100,00	100,00%
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,00	82,23	130,52%	82,00	86,87	105,94%	85,00	90,38	106,33%	87,00	100,00	114,94%	95,19	98,99	103,99%
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	100,00	117,65%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	120,00	120,00%	100,00	120,00	120,00%

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	25,00	21,05	84,20%	50,00	36,36	72,72%	55,00	46,67	84,85%	60,00	61,29	102,15%	61,30	69,70	113,70%
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	48,00	35,46	73,88%	60,00	55,95	93,25%	63,00	55,76	88,51%	66,00	67,38	102,09%	68,00	78,14	114,91%
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77,00	100,00	129,87%	79,00	100,00	126,58%	100,00	100,00	100,00%
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													95,00	93,33	98,24%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Dumai															
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86,85	91,24	105,05%	91,50	93,11	101,76%	92,40	93,70	101,41%	93,30	94,26	101,03%	95,10	95,37	100,28%
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Dumai															
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	50,00	125,00%	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	50,00	60,00	120,00%	50,00	60,00	120,00%
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37,50	50,00	133,33%	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	50,00	60,00	120,00%	50,00	60,00	120,00%

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Dumai															
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00	100,00	153,85%	97,00	100,00	103,09%	98,00	100,00	102,04%	99,00	100,00	101,01%	85,00	100,00	117,65%
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan															
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Dumai yang optimal							2,25	2,50	111,11%	2,50	3,00	120,00%	3,00	2,50	83,33%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan															
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Dumai													92,00	86,95	94,51%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Dumai yang optimal															
Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Dumai	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%									
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%									
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Balai POM di Dumai							80,60	75,23	93,34%	82,20	76,23	92,74%	79,24	77,49	97,79%

Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai POM di Dumai													89,10	91,62	102,83%
Terwujudnya SDM Balai POM di Dumai yang berkinerja optimal															
Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Dumai	75,00	86,33	115,11%	86,40	85,36	98,80%	86,50	84,64	97,85%	88,60	89,97	101,55%	90,07	86,16	95,66%
Terkelolanya keuangan Balai POM di Dumai secara akuntabel															
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Dumai	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%									
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Dumai				100,00	100,00	100,00%	90,60	90,90	100,33%	91,80	89,89	97,92%	90,00	91,53	101,70%
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													98,16	100,00	101,87%
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													75,00	94,51	126,01%
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri													66,26	93,72	141,44%

Dari tahun 2018 – Maret 2025, Balai POM di Dumai masih berstatus UPT Loka POM di Kota Dumai. Pada bulan Maret 2025, Loka POM di Kota Dumai berubah klasifikasi menjadi Balai POM di Dumai.

Selama empat tahun terakhir, nilai kinerja Balai POM di Dumai menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung meningkat sejak tahun 2020. Meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, Balai POM di Dumai berhasil menunjukkan peningkatan yang konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Nilai kinerja pada tahun 2024 mendekati capaian tertinggi yang diraih, yaitu 102,38. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Dumai telah berhasil melakukan upaya perbaikan yang signifikan untuk meningkatkan kinerja setelah penurunan di tahun 2021 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1.1 Nilai Kinerja Balai POM di Dumai Tahun 2021 – 2024

Pengukuran kinerja Balai POM di Dumai mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Dumai. Dalam penyusunan sasaran strategis, Balai POM di Dumai menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*,

dan learning and growth perspective. Kegiatan prioritas Balai POM di Dumai selama periode 2021 - 2024 sebagai berikut:

1. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Dari tahun 2021 hingga 2024, jumlah sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi menunjukkan tren yang fluktuatif dengan total sebanyak 818 sarana dan jumlah produk obat dan makanan yang disampling untuk dilakukan pengujian adalah sebanyak 2.514 produk.
2. Perizinan merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Terdapat pertumbuhan jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Dumai untuk pengurusan permohonan izin edar produk obat dan makanan dengan total 94 permohonan selama periode tahun 2021 s.d 2024.
3. Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan penjualan obat dan makanan secara online/daring pada marketplace dan sosial media. Pada pelaksanaannya, BPOM berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi e-commerce, dalam hal ini idEA (*Indonesian E-commerce Association*). Dalam kurun waktu 2021 s.d. 2024, Balai POM di Dumai menemukan 164 tautan daring yang mengedarkan Obat dan Makanan ilegal. Terhadap temuan tersebut, telah direkomendasikan untuk dilakukan penurunan konten secara kolaboratif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. Balai POM di Dumai melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. selama tahun 2021 - 2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 11 UMKM.
5. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, Balai POM di Dumai melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selama periode 2021 s.d. 2024 kegiatan KIE fluktuatif dengan total 118 KIE dengan peserta sebanyak 6.307 orang. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

6. Revitalisasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial pada bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Balai POM di Dumai memiliki 10 Sasaran Kegiatan dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Kegiatan dan IKU ini berubah sepanjang 2021 - 2024 mengikuti perjanjian kinerja dengan pusat. Beberapa sasaran kegiatan yang ditambahkan sepanjang periode renstra. Selain Sasaran Kegiatan, IKU juga mengalami perubahan, sementara beberapa IKU ada yang ditambahkan dan ada pula yang dihapuskan. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di masing –masing Wilayah Kerja UPT

Produk yang diawasi oleh Balai POM di Dumai tergolong berisiko tinggi, sehingga pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis di sepanjang rantai pengawasan. Sistem ini harus mampu mendeteksi dini penurunan mutu, keberadaan produk substandar, atau potensi masalah lainnya agar langkah pencegahan dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat. sasaran kegiatan ini diukur melalui empat indikator kinerja yaitu:

a. Persentase Obat yang memenuhi syarat



Capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada Balai POM di Dumai menunjukkan tren yang konsisten meningkat sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase obat memenuhi

syarat tercatat sebesar 85,61%, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 86,12%. Meskipun peningkatan pada periode ini relatif kecil, hal tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat pengawasan mutu obat. Perbaikan signifikan mulai tampak pada tahun 2022, di mana capaian naik menjadi 92,45%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 99,02%, yang menandakan semakin minimnya temuan produk obat yang tidak memenuhi syarat di wilayah kerja. Pada tahun 2024, capaian mencapai 100,8%, yang menggambarkan performa pengawasan yang sangat optimal, di mana seluruh sampel obat yang diuji tidak hanya memenuhi standar mutu tetapi juga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat



Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menunjukkan tren berfluktuasi namun meningkat secara umum sepanjang 2020–2024. Pada 2020 capaian berada di 94,54% dan meningkat menjadi 98,43% pada 2021. Tahun 2022 terjadi penurunan ke 93,56%, mengindikasikan meningkatnya temuan ketidaksesuaian pangan. Melalui penguatan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha, capaian kembali meningkat menjadi 96,12% pada 2023. Tren positif ini berlanjut hingga 2024 dengan capaian 105,35%, yang mencerminkan efektivitas pengawasan serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dalam memenuhi standar keamanan dan mutu.

d. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun dengan dinamika yang wajar. Pada 2020 capaian sebesar 83,34%, kemudian meningkat menjadi 93,07% pada 2021 dan 97,72% pada 2022, mencerminkan penguatan pengawasan mutu obat di wilayah kerja. Peningkatan paling tinggi terjadi pada 2023 dengan capaian 115,76%, yang menggambarkan tingginya kepatuhan pelaku usaha serta efektivitas pengawasan berbasis risiko. Pada 2024 capaian berada di 102,49%, sedikit menurun namun tetap melampaui target yang ditetapkan.

e. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan pengawasan pangan di wilayah Dumai. Setelah capaian yang sangat tinggi pada 2020 sebesar 126,32%, terjadi penurunan bertahap hingga mencapai 69,45% pada 2023. Penurunan ini menggambarkan meningkatnya temuan ketidaksesuaian serta perlunya penguatan pembinaan dan penerapan keamanan pangan pada pelaku usaha, khususnya UMKM.

Melalui intensifikasi pengawasan berbasis risiko, peningkatan frekuensi sampling, dan penguatan edukasi pelaku usaha, capaian berhasil meningkat signifikan pada 2024 menjadi 102,49%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, Balai POM di Dumai melakukan beberapa upaya yaitu:

- a. Menetapkan dan menyusun perencanaan sampel pada awal tahun sesuai dengan Pedoman Sampling.
 - b. Melakukan pengambilan sampel produk secara acak (random) maupun terarah (targeted) untuk diuji di balai pengujian regional sesuai dengan Pedoman Sampling yang telah ditetapkan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan balai pengujian untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu pengujian.
 - d. Pemanfaatan google spreadsheet hasil Pengujian Regionalisasi Laboratorium terlaksana dengan baik, sehingga petugas dapat memonitoring dan melakukan follow up terhadap hasil uji sampel yang telah diperiksa.
- 2. Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di masing masing Wilayah Kerja UPT**
- Pengawasan obat dan makanan di Balai POM dilakukan secara menyeluruh, mencakup tahap sebelum produk beredar (*pre-market*) hingga setelah produk beredar (*post-market*) dengan beberapa kegiatan diantaranya, pemeriksaan dilakukan pada tempat produksi dan distribusi untuk memastikan produk yang beredar aman, bermanfaat, dan memenuhi standar mutu. Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus utama dalam mendukung tugas pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Dumai.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, terdapat enam indikator yaitu:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan



Capaian indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan menunjukkan kinerja yang stabil sepanjang periode 2020–2024. Pada 2020 capaian berada pada 112,35%, kemudian menurun ke 101,85% pada 2021 namun tetap berada di atas target. Peningkatan terjadi pada 2022 dengan capaian 103,8%, sebelum kembali menurun secara bertahap menjadi 101,01% pada 2023 dan 100% pada 2024.

- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



Tren capaian kinerja persentase keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan menunjukkan

pola fluktuatif sepanjang tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian berada pada tingkat yang sangat tinggi (130,52%), namun menurun cukup tajam pada 2021 menjadi 105,94%. Pada 2022 capaian stabil dengan sedikit peningkatan ke 106,33%. Tahun 2023 terjadi kenaikan signifikan hingga mencapai 114,94%, sebelum kembali menurun pada 2024 menjadi 103,99%. Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, capaian kinerja tetap berada di atas 100%, yang menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi inspeksi secara umum masih melampaui target yang ditetapkan.

c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu



Tren capaian kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan pola menurun lalu meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian berada pada tingkat tinggi yaitu 117,65%. Namun, pada 2021 terjadi penurunan menjadi 100% dan kondisi ini tetap stabil pada 2022. Memasuki tahun 2023, capaian kembali meningkat signifikan hingga mencapai 120% dan bertahan pada tingkat yang sama di 2024. Secara keseluruhan, meskipun sempat menurun pada awal periode, kinerja kembali membaik dan menunjukkan peningkatan yang konsisten pada dua tahun terakhir.

d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



Capaian kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan menunjukkan pola peningkatan setelah mengalami penurunan pada awal periode. Pada tahun 2020, capaian berada pada angka 84,2%, kemudian menurun cukup signifikan menjadi 72,72% pada tahun 2021. Namun, sejak 2022 tren mulai membaik, meningkat kembali menjadi 84,85%, lalu naik tajam pada 2023 mencapai 102,15%. Tren positif ini berlanjut hingga 2024 dengan capaian tertinggi sebesar 113,7%. Secara keseluruhan, indikator menunjukkan peningkatan kinerja yang kuat dalam tiga tahun terakhir setelah sempat turun pada 2021.

e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



Capaian kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan menunjukkan tren peningkatan secara umum sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian berada pada angka 73,88%, kemudian meningkat signifikan menjadi 93,25% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan ke 88,51%, namun tren kembali meningkat pada 2023 dengan capaian 102,09% dan mencapai nilai tertinggi pada 2024 sebesar 114,91%. Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan perbaikan yang konsisten dalam empat tahun terakhir, dengan pencapaian yang semakin melampaui target di dua tahun terakhir.

- f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik



Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik menunjukkan perkembangan yang sangat fluktuatif sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian tercatat 0%, menandakan belum adanya UMKM yang memenuhi standar pada dua tahun awal. Namun, pada 2022 terjadi lonjakan luar biasa hingga 129,87%, yang kemudian sedikit menurun menjadi 126,58% pada 2023. Pada 2024 capaian turun lebih jauh menjadi 100%, namun tetap berada dalam rentang yang memenuhi target.

- g. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota.



Indikator berikut merupakan indikator baru yang ditambahkan pada tahun 2024 sehingga tidak ada capaian dari tahun 2020 – 2023 untuk indikator ini. Capaian pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan partisipasi UPT yang sangat signifikan dan menggambarkan keberhasilan upaya penguatan peran UPT dalam program-program terkait.

Upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki capaian kinerja sasaran kegiatan adalah:

- Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara konsisten dengan mengacu pada timeline yang telah disepakati.
- Melakukan komunikasi intensif dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan.
- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan.
- Mempertimbangkan masukan masyarakat untuk terus melakukan perbaikan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat semakin optimal.

3. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat Dan Makanan di masing- masing Wilayah Kerja UPT

Sesuai dengan prinsip tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya adalah pengawasan berbasis masyarakat, Balai POM di Dumai berupaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang aktif dan strategis. Pengetahuan masyarakat yang lebih baik diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku yang mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur menggunakan satu indikator kinerja yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.



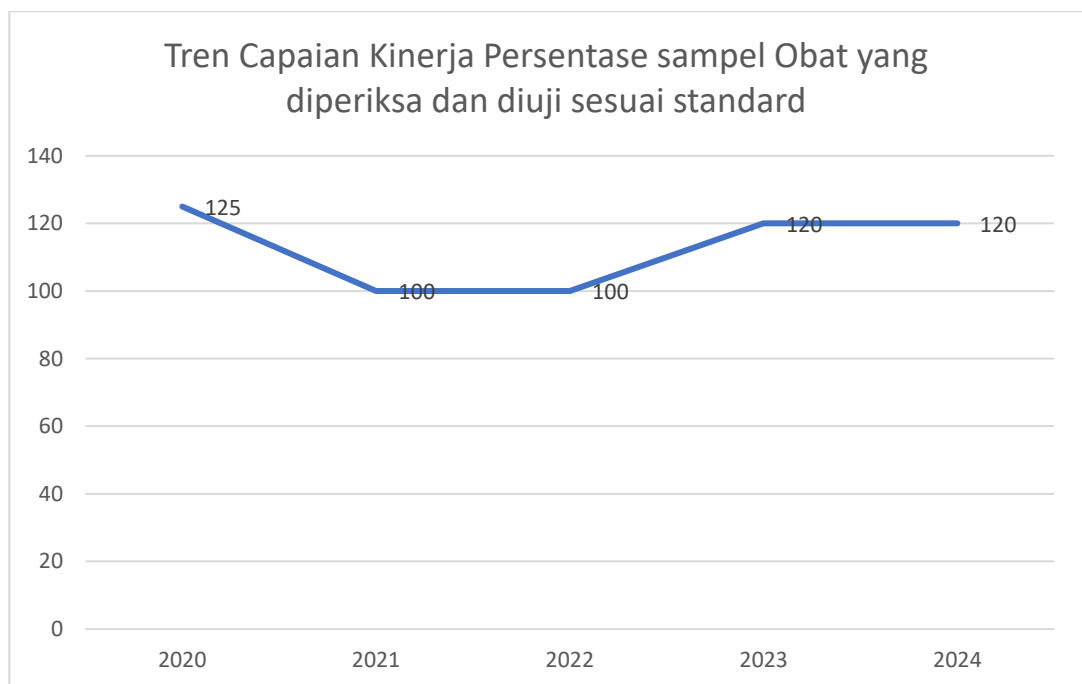
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran kegiatan adalah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat secara *online* maupun *offline*.
- b. Memberikan informasi Obat dan Makanan dengan memanfaatkan media digital, media cetak, media sosial, iklan layanan masyarakat, serta di berbagai tempat transportasi umum.
- c. Membuat konten edukasi yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.
- d. Meningkatkan kerjasama serta kolaborasi dengan berbagai pihak baik itu dari Intasni Pemerintah, Komunitas Masyarakat, Influencer, Organisasi non Pemerintah dan sebagainya.

4. Sasaran Kegiatan IV : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT

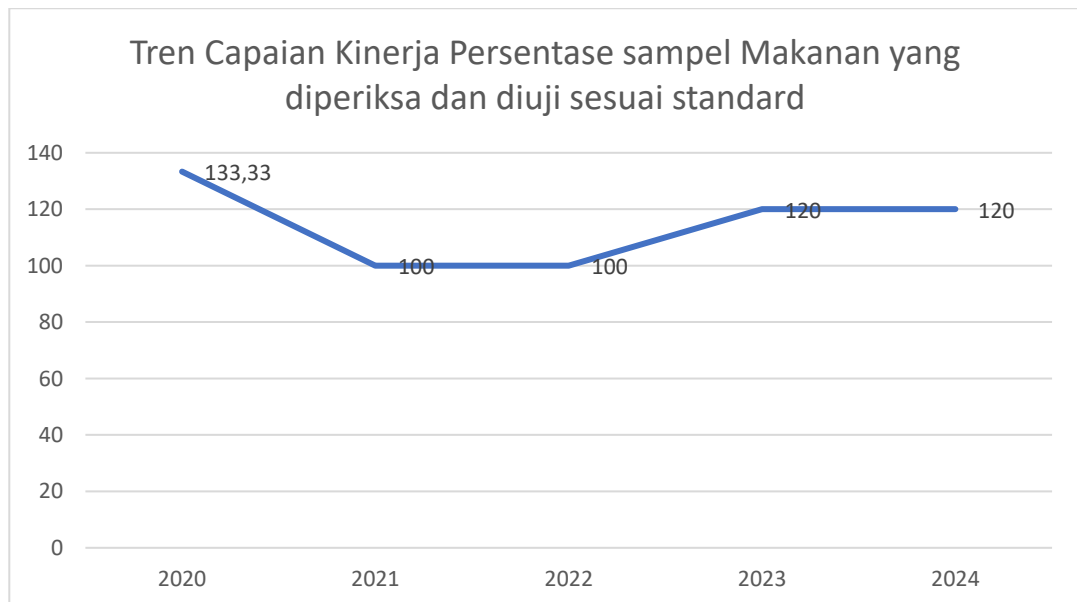
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar Balai POM di Dumai mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard



Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar menunjukkan pola fluktuatif namun tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian mencapai 125%, kemudian menurun ke 100% pada 2021 dan bertahan pada nilai yang sama di 2022. Memasuki tahun 2023, capaian meningkat kembali menjadi 120% dan stabil pada angka tersebut hingga 2024.

b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar juga menunjukkan pola fluktuatif namun tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian mencapai 125%, kemudian menurun ke 100% pada 2021 dan bertahan pada nilai yang sama di 2022. Memasuki tahun 2023, capaian meningkat kembali menjadi 120% dan stabil pada angka tersebut hingga 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan yaitu:

- a. Menetapkan dan menyusun perencanaan sampel pada awal tahun sesuai dengan Pedoman Sampling.
 - b. Melakukan pengambilan sampel produk secara acak (random) maupun terarah (targeted) untuk diuji di balai pengujian regional sesuai dengan Pedoman Sampling yang telah ditetapkan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan balai pengujian untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu pengujian.
- 5. Sasaran Kegiatan V : Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Di masing–masing Wilayah Kerja UPT**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan,

ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.



Tren persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian berada pada tingkat yang sangat tinggi yaitu 153,85%, yang mencerminkan keberhasilan penindakan yang melampaui target secara signifikan. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 103,09%, meskipun capaian tersebut masih berada di atas target.

Pada tahun 2022 dan 2023, kinerja relatif stabil dengan capaian masing-masing 102,04% dan 101,01%, menunjukkan konsistensi meski berada pada level yang lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2024, capaian kembali mengalami peningkatan menjadi 117,65%, menandakan perbaikan efektivitas penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

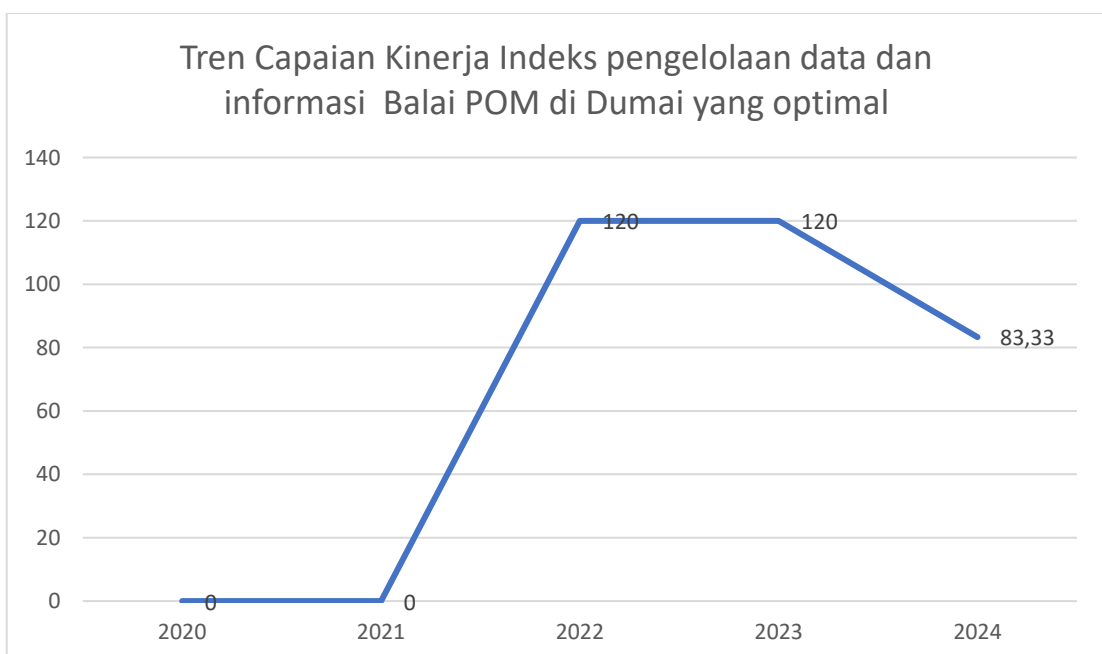
Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan setelah 2020, tren menunjukkan bahwa kinerja penindakan tetap berada di atas 100% setiap tahun, menandakan keberhasilan yang konsisten dalam mencapai dan melampaui target penindakan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi teknis petugas.
- b. Advokasi kegiatan penyidikan obat dan makanan.
- c. Perkuatan koordinasi lintas sektor CJS.

6. Sasaran Kegiatan VI : Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan satu indikator yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.



Indikator berikut baru ditetapkan pada tahun 2022, ketika capaian meningkat drastis menjadi 120%, menandakan adanya peningkatan kualitas atau kelengkapan pengelolaan data dan informasi yang jauh melampaui target. Pencapaian ini tetap konsisten pada tahun 2023 dengan level yang sama, yaitu 120%, menunjukkan stabilitas dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem data informasi yang optimal.

Namun pada tahun 2024, capaian mengalami penurunan menjadi 83,33%. Meskipun masih berada dalam kategori cukup baik, angka ini menunjukkan

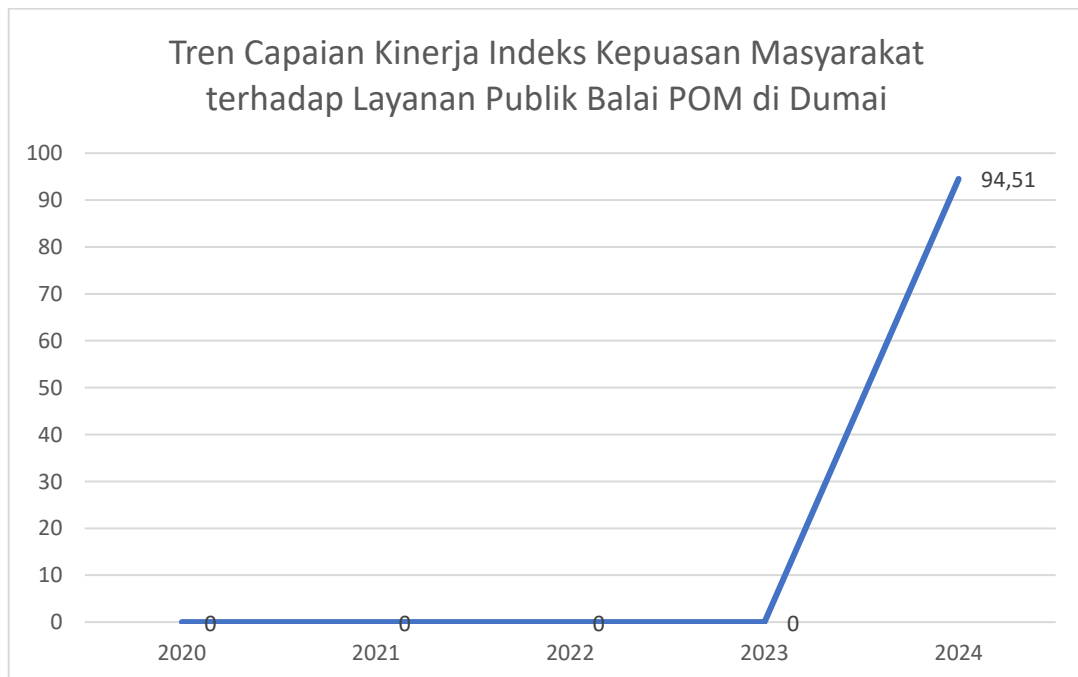
adanya kendala atau penurunan efektivitas dalam pengelolaan data dan informasi dibanding dua tahun sebelumnya.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan yaitu:

- a. Memaksimalkan penggunaan email corporate pegawai dan kantor.
- b. Meningkatkan keaktifan dalam mengakses aplikasi yang tersedia pada dashboard BCC BPOM.
- c. Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi.

7. Sasaran Kegiatan VII : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan Makanan

Kepuasan pelaku usaha dan masyarakat merupakan faktor penting dalam pengawasan obat dan makanan. Sasaran strategis ini dapat diukur melalui indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik UPT.

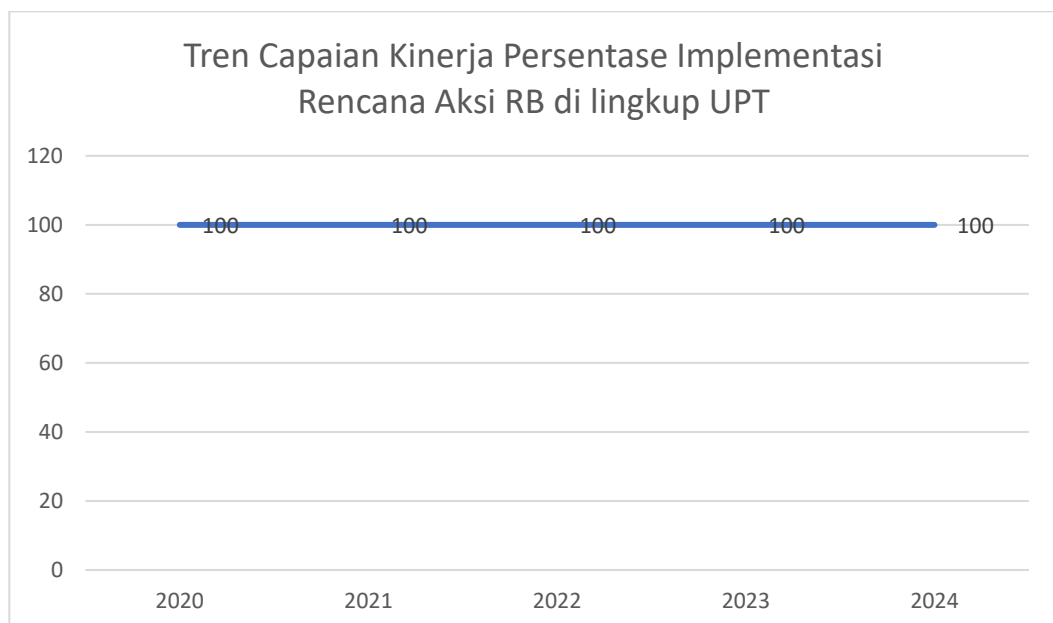


Indikator berikut merupakan indikator baru yang ditambahkan pada tahun 2024 sehingga tidak ada capaian dari tahun 2020 – 2023 untuk indikator ini.

Untuk meningkatkan pencapaian sasaran ini, beberapa upaya yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik dengan responsivitas dan efisiensi yang lebih baik.
 - b. Memperkuat komunikasi dan informasi yang transparan dan mudah diakses.
 - c. Melibatkan masyarakat dan pelaku usaha secara aktif melalui dialog dan konsultasi berkala.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap kepuasan layanan dengan menindaklanjuti hasil survei IKM dan masukan masyarakat.
- 8. Sasaran Kegiatan VIII : Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan UPT yang Optimal**
 Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan adalah:

- a. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT



Capaian persentase implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup UPT menunjukkan konsistensi yang sangat baik sepanjang periode 2020–2024. Selama lima tahun tersebut, capaian selalu berada pada angka 100%, menandakan bahwa seluruh rencana aksi RB yang ditargetkan berhasil dilaksanakan sepenuhnya setiap tahun.

- b. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu



Capaian persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu menunjukkan perubahan drastis dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian tercatat 100%, yang berarti seluruh dokumen ketatausahaan berhasil dilaporkan tepat waktu. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, indikator ini tidak lagi menjadi indikator di Balai POM di Dumai.

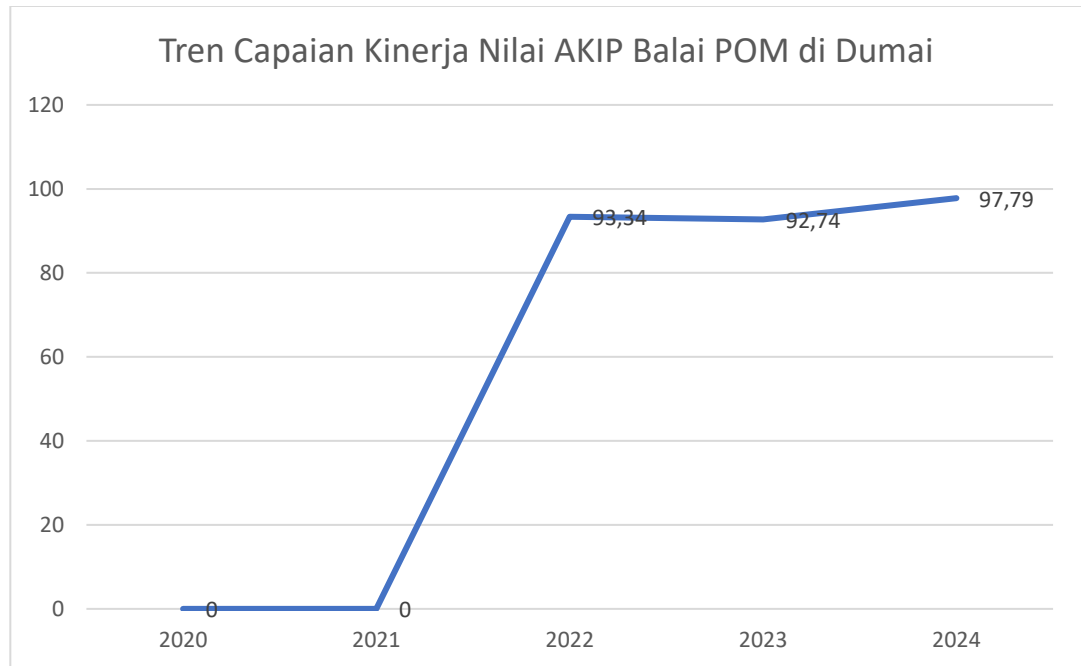
- c. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu



Capaian persentase penyusunan Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara tepat waktu menunjukkan penurunan drastis

dalam kurun waktu 2020–2024. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian berada pada tingkat maksimal yaitu 100%, yang menandakan seluruh dokumen terkait berhasil disusun tepat waktu. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, indikator ini tidak lagi menjadi indikator di Balai POM di Dumai.

d. Nilai AKIP Balai POM di Dumai



Indikator berikut baru ditetapkan pada tahun 2022. Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan capaian yang sangat besar, dengan Nilai AKIP meningkat menjadi 93,34, menandai adanya perbaikan yang kuat dalam sistem akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan. Pada tahun 2023, nilai sedikit menurun menjadi 92,74, namun tetap berada dalam kategori baik dan menunjukkan konsistensi pelaksanaan prinsip akuntabilitas.

Pada tahun 2024, capaian kembali meningkat menjadi 97,79, yang merupakan nilai tertinggi sepanjang periode. Peningkatan ini menggambarkan penguatan manajemen kinerja, efektivitas perencanaan, serta perbaikan tata kelola yang berkelanjutan di Balai POM di Dumai.

e. Nilai Pengelolaan Kearsipan



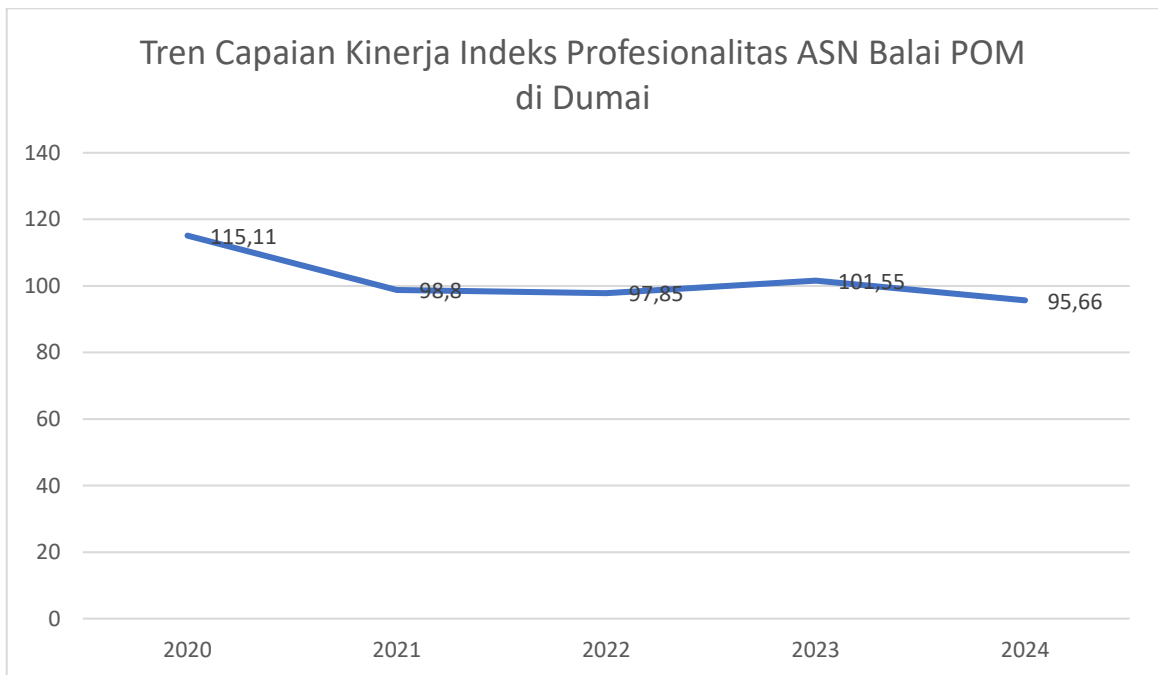
Indikator berikut baru masuk pada indikator kinerja utama Balai POM di Dumai pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2020 – 2023 tidak memiliki target dan capaian pada perjanjian kinerja.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan yaitu:

- a. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat Badan POM RI.
- b. Melaksanakan poin – poin yang mendukung dalam Implementasi Reformasi Birokrasi pada Loka POM.
- c. Menerapkan tata cara kearsipan yang telah ditentukan pada unit kerja.

9. Sasaran Kegiatan IX : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan satu indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN BPOM.



Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan yaitu:

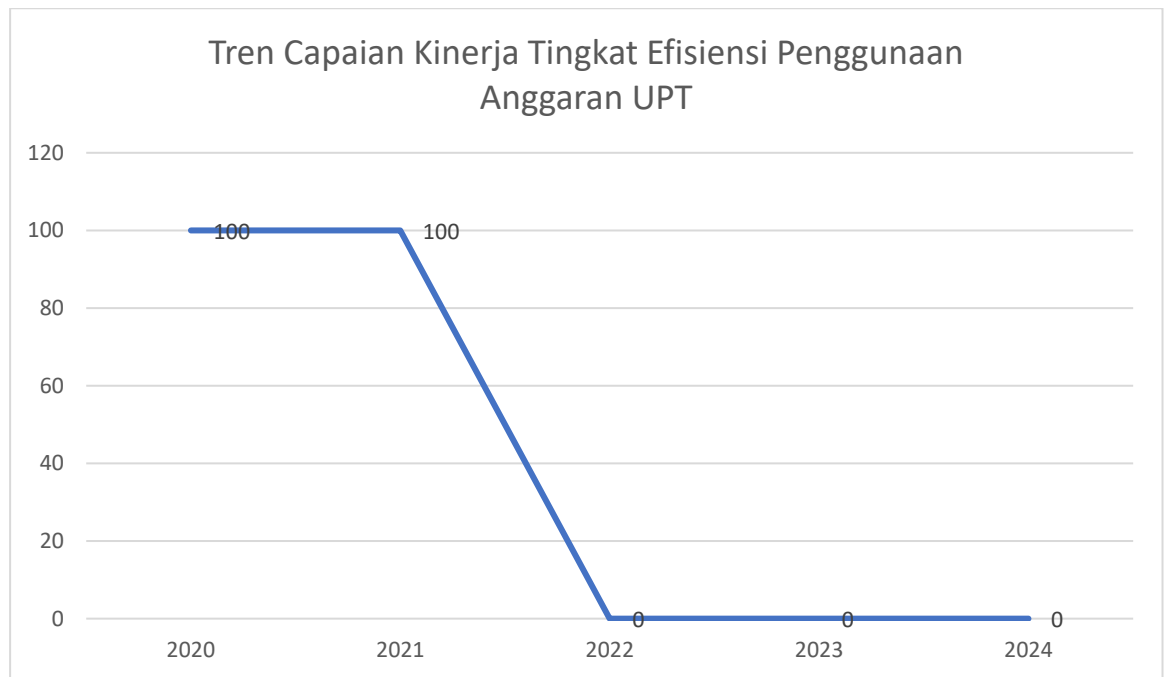
- a. Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dapat dilakukan dengan memberikan penugasan kepada pegawai untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi minimal 20 JP.
- b. Menegakan disiplin dan kode etik, serta kode perilaku agar tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
- c. Mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal.
- d. Mengajukan diklat fungsional bagi pegawai jabatan fungsional yang belum melakukan diklat.

10. Sasaran Kegiatan X : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting dan menuntut akuntabilitas tinggi dalam penggunaannya. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan efektivitas dan efisiensi, tetapi juga mendukung kredibilitas instansi dalam menjalankan tugasnya.

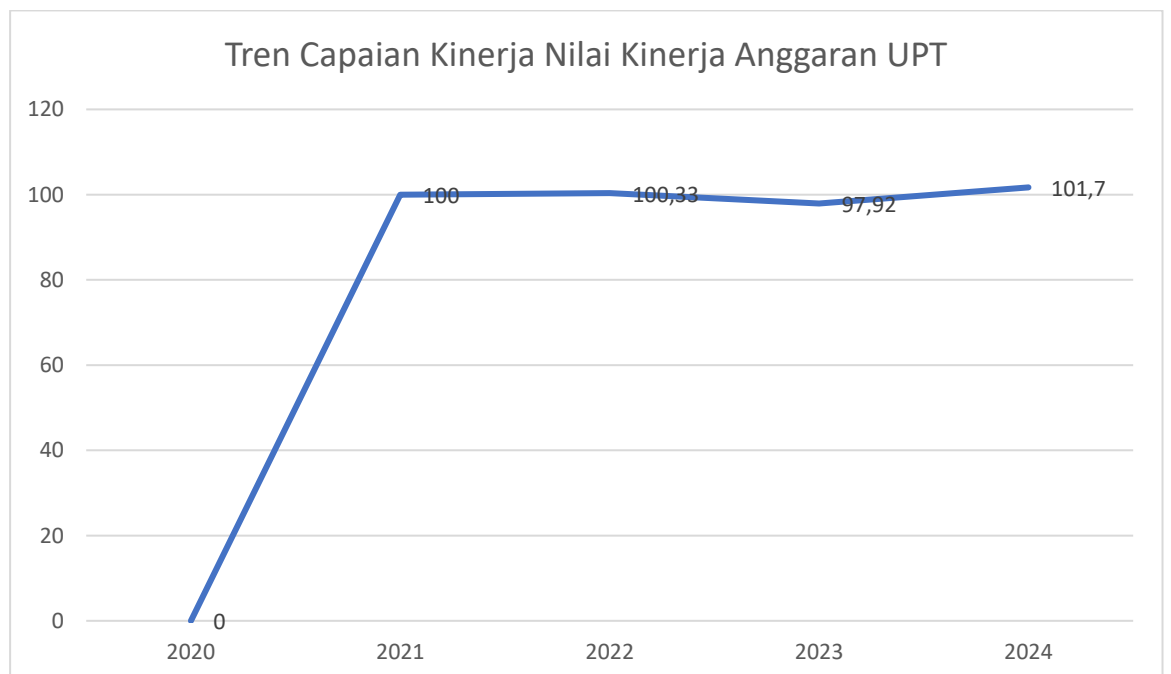
Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan lima indikator yaitu:

- a. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT



Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat efisiensi mencapai 100%, menandakan bahwa penggunaan anggaran berada dalam batas efisiensi yang sangat baik serta sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, indikator ini tidak lagi menjadi indikator di Balai POM di Dumai.

b. Nilai Kinerja Anggaran UPT



Indikator berikut baru ditetapkan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, capaian meningkat sangat signifikan menjadi 100%, menunjukkan perbaikan yang kuat dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Kinerja

yang baik ini mampu dipertahankan pada tahun 2022 dengan capaian 100,33%, sedikit melampaui target yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas anggaran yang baik.

Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 97,92%, meskipun demikian capaian tersebut masih berada dalam kategori sangat baik dan menunjukkan konsistensi kinerja anggaran UPT.

Pada tahun 2024, capaian kembali meningkat menjadi 101,7%, yang mencerminkan adanya optimalisasi dalam penggunaan anggaran sehingga hasil yang diperoleh mampu melampaui target yang ditetapkan.

c. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa



Indikator berikut merupakan indikator baru yang ditambahkan pada tahun 2024 sehingga tidak ada capaian dari tahun 2020 – 2023 untuk indikator ini.

d. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara



Indikator berikut merupakan indikator baru yang ditambahkan pada tahun 2024 sehingga tidak ada capaian dari tahun 2020 – 2023 untuk indikator ini.

e. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri



Indikator berikut merupakan indikator baru yang ditambahkan pada tahun 2024 sehingga tidak ada capaian dari tahun 2020 – 2023 untuk indikator ini.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan yaitu:

- a. Mengelola Pagu Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Efisiensi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Pemanfaatan aplikasi pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Barang Milik Negara.
- d. Memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap kegiatan pengadaan, sesuai dengan arahan pemerintah.

1.1.1 ASPIRASI *STAKEHOLDER*

Dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan, lingkungan strategis dapat mempengaruhi tantangan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Dumai. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru dan dinamika sosial ekonomi. Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, sehingga diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, aspirasi dan masukan dari *stakeholder* juga

merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan.

Aspirasi stakeholder sangat penting bagi Balai POM di Dumai dalam berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan, kebijakan, serta inovasi dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Balai POM di Dumai juga memahami bahwa keterlibatan stakeholder bukan hanya sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari proses pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan industri. Aspirasi masyarakat juga membantu Balai POM di Dumai dalam memahami bagaian perubahan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, yang dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Balai POM di Dumai senantiasa menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan serta peran strategis dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Berikut rangkuman aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap Balai POM di Dumai.

1. Pemerintah Daerah (Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir)
Pemerintah daerah memiliki aspirasi agar sinergi program antara BPOM dan pemerintah daerah semakin diperkuat, terutama dalam melindungi masyarakat serta meningkatkan daya saing produk UMKM lokal. Stakeholder ini juga mengharapkan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilakukan secara lintas sektor serta peningkatan kolaborasi dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan pangan dan obat.
2. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri)
Aparat penegak hukum berkomitmen mendukung sistem peradilan pidana (criminal justice system) di bidang pengawasan obat dan makanan. Mereka mengharapkan koordinasi yang lebih intensif dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

3. Kantor Bea dan Cukai
Kantor Bea dan Cukai memiliki aspirasi untuk memperkuat kerja sama dengan Balai POM di Dumai dalam pengawasan post-border terhadap produk impor obat dan makanan. Harapan yang disampaikan adalah terwujudnya pertukaran data dan informasi yang lebih cepat serta pelaksanaan kegiatan pengawasan bersama guna menekan peredaran produk ilegal.
4. Organisasi Profesi (IAI, PAFI, IDI, PDGI, IBI)
Organisasi profesi mengharapkan peningkatan kolaborasi dengan Balai POM dalam upaya meningkatkan peran tenaga kesehatan dan tenaga kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku. Aspirasi utama yang disampaikan adalah peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi regulasi di bidang obat dan makanan, serta penguatan profesionalisme anggota dalam mendukung pengawasan.
5. Sekolah, Universitas, dan Lembaga Pendidikan
Lembaga pendidikan mengharapkan peningkatan kerja sama dalam kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, untuk menumbuhkan kesadaran konsumen yang cerdas terhadap produk obat dan makanan aman, bermutu, dan berkhasiat.
6. Pelaku Usaha
Pelaku usaha menekankan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan dari Balai POM dalam penerapan regulasi produksi dan distribusi obat serta makanan. Mereka mengharapkan adanya kemudahan dalam proses perizinan, peningkatan daya saing produk lokal, serta pelaksanaan sosialisasi teknis secara rutin terkait standar mutu dan keamanan produk.
7. Masyarakat
Sebagai penerima manfaat utama, masyarakat menginginkan jaminan bahwa obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu. Mereka juga berharap adanya mekanisme pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses serta tindak lanjut yang cepat terhadap keluhan masyarakat. Peningkatan frekuensi kegiatan edukasi publik menjadi salah satu harapan utama masyarakat.

8. Media

Media massa berperan penting dalam penyebarluasan informasi publik dan berharap Balai POM di Dumai semakin transparan serta akuntabel dalam menyampaikan hasil pengawasan obat dan makanan. Media juga menginginkan hubungan kerja sama yang lebih erat dalam publikasi informasi terkait kegiatan pengawasan.

Secara umum, hasil analisis stakeholder menunjukkan bahwa seluruh pihak menaruh perhatian besar terhadap upaya Balai POM di Dumai dalam melindungi masyarakat dan menjamin keamanan obat serta makanan. Aspirasi yang muncul berfokus pada tiga hal utama:

- b. Peningkatan sinergi lintas sektor antara pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga mitra.
- c. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui pendampingan, edukasi, serta kemudahan perizinan
- d. Penguatan tata kelola internal mencakup transparansi, profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia.

Dengan memperhatikan aspirasi tersebut, Balai POM di Dumai diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pengawasan dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat yang terlindungi dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menyusun Renstra Balai POM di Dumai 2025 – 2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi adalah kunci dalam merancang strategi pengawasan obat dan makanan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tetapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Kota Dumai sebagai salah satu jalur utama pintu masuk ke Provinsi Riau melalui Pelabuhan Internasional Dumai harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jalur transportasi produk obat dan makanan yang cukup intens berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang obat dan makanan. Selain itu, perkembangan UMKM di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis juga menuntut Balai POM di Dumai memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak

melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Dumai sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2025-2029. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Dumai perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Dumai menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Dumai periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Dumai, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1. KEKUATAN (*STRENGTH*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Dumai, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan BPOM keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BPOM di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas dan berkompeten
SDM Balai POM di Dumai yang profesional, berintegritas, dan berkompeten memiliki kekuatan strategis yang menjadi fondasi utama keberhasilan dalam mencapai target kinerja Balai POM di Dumai. Kekuatan ini tercermin dalam

kemampuannya menjalankan tugas dengan efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. SDM Balai POM di Dumai memiliki daya saing yang tinggi, mampu memberikan pelayanan prima, menjaga reputasi kelembagaan, serta menjadi organisasi yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan masyarakat maupun tuntutan perkembangan zaman.

SDM Balai POM di Dumai telah mengikuti pelatihan sebagai langkah dalam pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatan masing – masing. Mereka memahami regulasi seperti CPOB, CPPOB, CPOTB, dan memiliki kompetensi dalam pemeriksaan sarana, edukasi publik, dan pengambilan sampel.

Dengan profesionalisme dan kompetensi SDM Balai POM di Dumai, Balai POM Dumai mampu melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara sistematis, akurat, dan terstandarisasi.

2. Kekuatan Geografis Wilayah Kerja dalam Mendukung Fungsi Pengawasan
Balai POM di Dumai memiliki kekuatan yang signifikan dalam menjalankan tugas Pengawasan Obat dan Makanan karena letak wilayah kerjanya yang sangat strategis. Kota Dumai merupakan kota pelabuhan penting di pesisir timur Pulau Sumatera, yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka. Begitu juga dengan letak geografis Kabupaten Bengkalis yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Posisi ini memberikan kemudahan akses terhadap arus keluar-masuk produk obat dan makanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, pengawasan terhadap produk impor dan ekspor dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat waktu, terutama dalam mencegah peredaran produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi standar keamanan.

Selain itu, Kota Dumai dikenal sebagai kawasan industri yang terus berkembang, khususnya di sektor pengolahan minyak sawit, kimia, dan makanan olahan. Hal ini menjadikan wilayah kerja Balai POM di Dumai sebagai titik strategis untuk melakukan pengawasan terhadap produksi dan distribusi produk dalam skala besar. Keberadaan industri-industri tersebut memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih efisien karena titik-titik risiko dapat dipetakan dengan lebih jelas, sehingga pengambilan sampel, inspeksi, maupun pembinaan terhadap pelaku usaha dapat difokuskan pada area prioritas.

Dengan posisi strategis tersebut, Balai POM di Dumai juga memiliki peran penting dalam melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat serta pelaku usaha. Komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keamanan obat dan makanan dapat disampaikan secara lebih luas dan intensif. Kegiatan pembinaan terhadap pelaku industri dan UMKM juga dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan berkelanjutan, guna mendorong kepatuhan terhadap regulasi.

Secara keseluruhan, letak wilayah kerja yang strategis memberikan Balai POM di Dumai keunggulan dalam membangun sistem pengawasan yang efektif, adaptif, dan berbasis risiko. Hal ini tidak hanya memperkuat perlindungan masyarakat dari produk yang berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap ketahanan sistem pengawasan nasional dalam sektor obat dan makanan.

3. Dukungan Teknologi dan Sistem Informasi

Teknologi telah menjadi pendorong utama dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan pengambilan keputusan di lapangan. Dengan dukungan sistem informasi yang modern, proses pengawasan kini tidak lagi bersifat manual atau reaktif, melainkan berbasis data dan risiko, yang memungkinkan tindakan lebih cepat dan tepat sasaran.

Teknologi juga memperkuat peran edukatif Balai POM dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Melalui media sosial, aplikasi daring, serta website resmi, Balai POM di Dumai mampu menyebarkan informasi mengenai produk yang aman, cara mengenali produk ilegal, hingga pedoman label dan izin edar. Ini menjadikan masyarakat sebagai bagian aktif dari sistem pengawasan melalui pelaporan dan kewaspadaan terhadap produk yang dikonsumsi.

Dengan semua dukungan tersebut, Balai POM di Dumai tidak hanya menjalankan pengawasan secara fisik, tetapi juga memanfaatkan kekuatan digital untuk memperluas jangkauan, mempercepat respons, dan meningkatkan kualitas pengawasan. Penggunaan teknologi dan sistem informasi menjadi kekuatan utama dalam menciptakan sistem pengawasan obat dan makanan yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap tantangan zaman.

4. Kerjasama yang solid dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah

Salah satu kekuatan utama Balai POM di Dumai dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan adalah adanya kerja sama yang kuat dan solid dengan lintas sektor serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu, responsif, dan berkelanjutan di wilayah kerja yang cukup luas dan strategis.

Pengawasan obat dan makanan bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan membutuhkan sinergi antara berbagai pihak. Balai POM di Dumai menyadari hal ini dan secara aktif menjalin koordinasi dengan instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian, Bea Cukai, Kejaksaan Negeri, serta Pemerintah Kota dan Kabupaten di sekitarnya. Kolaborasi ini memungkinkan terbentuknya tim terpadu dalam pengawasan produk yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat, terutama di jalur distribusi, pelabuhan, pasar tradisional, hingga sentra industri rumah tangga.

Kekuatan kerja sama ini juga tercermin dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, seperti inspeksi gabungan, penertiban produk ilegal, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, hingga edukasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan oleh Bupati/Walikota serta terbitnya Surat Edaran dari Walikota Dumai terkait Pengendalian Peredaran Antibiotik Untuk Pencegahan Resistensi Antibiotik Di Kota Dumai.

5. Peran Aktif dalam Penyebaran Informasi Obat dan Makanan

Salah satu kekuatan penting yang dimiliki Balai POM di Dumai dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan adalah peran aktifnya dalam penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Informasi yang tepat, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat merupakan fondasi utama dalam membentuk perilaku konsumen yang cerdas dan kritis terhadap produk obat dan makanan yang dikonsumsi.

Balai POM di Dumai secara konsisten melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) sebagai bagian integral dari strategi pengawasan. Melalui berbagai media, seperti penyuluhan langsung, media sosial, website resmi, radio lokal, hingga kolaborasi dengan sekolah, pasar, dan komunitas, informasi mengenai cara memilih produk yang aman, membaca label, mengenali izin

edar, serta bahaya produk ilegal atau tanpa registrasi disampaikan dengan pendekatan yang mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk inovasi Balai POM di Dumai dalam melakukan edukasi dan pemberian informasi adalah Layanan INFOPOM dan KIE “Datuk Panglima”. Selain itu salah satu penyebaran informasi yang dilakukan oleh Balai POM di Dumai adalah melalui Media Sosial dan Kolaborasi dengan Lintas Sektor seperti Diskominfo Kota Dumai dan Kab. Rokan Hilir.

Peran aktif dalam penyebaran informasi ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Balai POM sebagai lembaga yang responsif dan peduli terhadap keselamatan konsumennya. Dengan keterbukaan informasi yang baik, masyarakat lebih mudah melaporkan temuan produk mencurigakan, menyampaikan keluhan, atau mencari informasi terkait obat dan makanan yang dikonsumsi. Ini menciptakan sistem pengawasan berbasis masyarakat yang memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan formal.

6. Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Balai POM Di Dumai dan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang Melakukan Pengawasan Terhadap Tindakan Penyuapan dan Gratifikasi

Balai POM di Dumai telah membentuk unit pengendalian gratifikasi sebagai garda terdepan dalam mencegah, mengawasi, serta menindaklanjuti segala bentuk gratifikasi yang berpotensi mencederai nilai kejujuran, transparansi dan profesionalisme dari seluruh pegawai Balai POM di Dumai. Balai POM di Dumai juga telah memiliki Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan tidak adanya praktik penyuapan dalam setiap pelayanan publik yang dilakukan oleh pegawai Balai POM di Dumai. Tim FKAP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penggerak budaya kerja bersih dan beretika.

Adanya unit pengendalian gratifikasi dan tim FKAP menjadi kekuatan strategis bagi Balai POM di Dumai yang menunjukkan bahwa Balai POM di Dumai telah menempatkan integritas sebagai pondasi utama dalam menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Dengan demikian, Balai POM di Dumai mampu membangun kepercayaan publik, memperkuat reputasi sebagai lembaga yang bebas dari praktik korupsi, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

7. Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai POM Di Dumai yang Telah Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif

Keberadaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai POM di Dumai yang telah memperoleh anugerah keterbukaan informasi publik sebagai Badan Publik Informatif merupakan salah satu kekuatan strategis dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Capaian ini mencerminkan komitmen Balai POM di Dumai dalam mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima secara berkelanjutan.

Pengelolaan layanan informasi publik yang telah berjalan secara sistematis, terstandar, dan responsif didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja Balai POM di Dumai, sekaligus memperkuat citra kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

8. Unit Pelayanan Publik yang Dapat Diakses Secara Luring Maupun Daring
Balai POM di Dumai terus memperkuat kualitas layanan melalui penyediaan unit pelayanan publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Layanan ini dirancang untuk memberikan akses yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan, baik melalui kunjungan luring di kantor maupun melalui pelayanan daring. Upaya ini sejalan dengan komitmen lembaga dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, serta memperkuat tata kelola pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

Pengembangan pelayanan publik berbasis luring dan daring tersebut tidak hanya bertujuan mempermudah akses, tetapi juga memastikan tersedianya pelayanan yang akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Optimalisasi sistem layanan digital, peningkatan standar operasional, serta penguatan SDM menjadi bagian dari strategi berkelanjutan yang diadopsi untuk menjawab tuntutan pelayanan yang semakin dinamis.

Atas konsistensi dan peningkatan kualitas tersebut, unit pelayanan publik Balai POM di Dumai telah berhasil memperoleh predikat Pelayanan Prima. Dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Predikat tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Balai POM di Dumai untuk terus

menjaga mutu, memperluas inovasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

Bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, Balai POM di Dumai berkomitmen melanjutkan transformasi layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Pelayanan luring maupun daring yang ditawarkan diharapkan menjadi ruang yang aman, mudah diakses, dan memberikan nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat dalam upaya memastikan peredaran obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

2. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai POM di Dumai tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Dumai menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Dumai dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai POM di Dumai, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan :

1. Belum Memiliki Laboratorium Pengujian sesuai Standar

Karena belum memiliki laboratorium, Balai POM di Dumai harus mengirimkan sampel ke laboratorium ke UPT lain di Badan POM sehingga memperpanjang waktu dan biaya untuk mendapatkan hasil pengujian. Hal ini juga menyebabkan Balai POM di Dumai belum dapat memenuhi permintaan pihak ketiga atas pengujian sampel pihak ketiga. Balai POM di Dumai hanya mampu melakukan pengujian Makanan yang bersifat kualitatif menggunakan test kit dengan parameter uji yang terbatas. Masyarakat yang ingin melakukan pengujian produk Obat dan Makanan dengan parameter uji lengkap dan bersifat kuantitatif tidak dapat langsung diterima oleh Balai POM di Dumai karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Balai Koordinator dan membutuhkan waktu dan proses lebih lanjut.

2. Belum Memiliki Gedung Kantor dan Fasilitas Pelayanan Publik yang sesuai Standar

Keterbatasan ruang Gedung dan Bangunan yang digunakan sebagai tempat operasional kantor Balai POM di Dumai belum memadai. Hal ini berpengaruh terhadap nilai Kepuasan Masyarakat dimana Masyarakat belum merasa puas dan nyaman dengan kondisi kantor Balai POM di Dumai karena tidak tersedianya halaman parkir yang belum memadai.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Balai POM di Dumai tahun 2025 adalah 87,15. Salah satu penilaian dari masyarakat yang belum optimal adalah dari ketersediaan sarana dan prasarana Balai POM di Dumai yang belum memadai seperti tempat parkir

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Belum Proporsional dengan Luas Wilayah Kerja

Balai POM di Dumai menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan jumlah petugas maupun terkait belum meratanya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Dengan wilayah kerja yang luas yaitu Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir dan banyaknya produk yang diawasi keterbatasan jumlah petugas yang tersedia dan tidak meratanya kompetensi petugas menjadi tantangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara merata, menyeluruh dan efektif.

Kebutuhan pegawai Balai POM di Dumai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) pada aplikasi SIRENPOM tahun 2025 ada 36 orang dengan rincian sebagai berikut.

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap
1	Kepala Balai POM di Dumai	1	1	0
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Dumai	1	1	0
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	1	1
4	Arsiparis Mahir	1	0	1
5	Arsiparis Terampil	1	0	1
6	Penata Laksana Barang Terampil	1	1	0

7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	8	3	5
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	13	11	2
9	Perencana Ahli Muda	1	0	1
10	Perencana Ahli Pertama	1	0	1
11	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	1
12	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0
13	Pranata Komputer Mahir	1	0	1
14	Pranata Komputer Terampil	1	1	0
15	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
16	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0
17	Pelaksana	0	1	-1
18	Penata Layanan Operasional	0	3	-3
19	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
TOTAL		36	26	10

Jumlah pengawas dan penyuluh masih terbatas, yang berdampak pada:

- **Pengawasan Rutin yang Tidak Menyeluruh**
Wilayah yang luas menyebabkan pengawasan berkala tidak dapat dilakukan secara merata di semua titik, terutama di daerah pelosok, pasar tradisional, dan wilayah kepulauan. Serta produk tanpa izin edar, kadaluarsa, atau mengandung bahan berbahaya berpotensi beredar lebih lama sebelum terdeteksi.
- **Keterlambatan Penanganan Pengaduan atau Temuan Lapangan**
Laporan dari masyarakat atau temuan dari instansi mitra seringkali tidak dapat segera ditindaklanjuti karena keterbatasan tim untuk turun ke lapangan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap responsibilitas lembaga dan memperbesar risiko terhadap kesehatan publik.
- **Edukasi dan Pembinaan Pelaku Usaha Terbatas**
Program pembinaan UMKM, pasar aman, sekolah intervensi keamanan pangan, dan desa pangan aman memerlukan kegiatan intensif dan pendampingan teknis. Dengan jumlah penyuluh yang terbatas, cakupan edukasi publik menjadi sempit, dan beberapa daerah mungkin tidak mendapatkan pendampingan sama sekali.

- Beban Kerja Pegawai Tinggi yang berpotensi Menurunnya Kualitas Layanan

SDM yang tersedia harus menjalankan berbagai peran ganda: pengawasan, edukasi, pelaporan, hingga penindakan. Hal ini menimbulkan kelelahan, penurunan fokus, dan risiko kesalahan administratif atau teknis. Dalam jangka panjang, beban kerja berlebih bisa berdampak pada burnout pegawai dan menurunkan motivasi kerja. Tidak semua pegawai dapat menjalankan tugas lintas fungsi (inspeksi, sampling, edukasi).

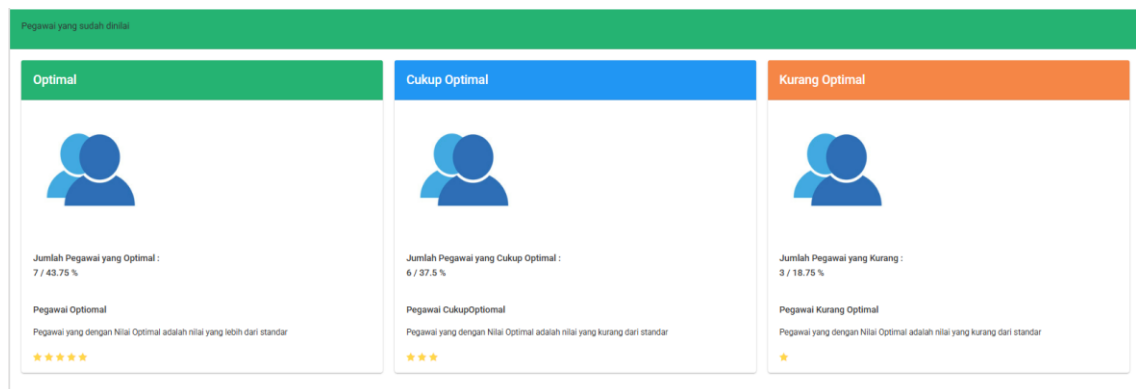
4. Belum tersedianya data terpilah/ data gender yang memadai baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan (pelaku usaha, masyarakat, mitra kerja)

Data terpilah/ data gender merupakan salah satu prasyarat dalam pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender. Data tersebut merupakan salah satu data pembuka wawasan yang menjadi landasan untuk menggalikan kesenjangan gender dalam analisis gender. Dengan belum memadainya ketersediaan data terpilah, maka pelaksanaan analisis gender belum dapat dilakukan secara komprehensif.

5. Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama pada aspek manajerial dan sosial kultural

Masih terdapat kesenjangan kompetensi di antara pegawai Balai POM di Dumai, terutama pada aspek manajerial dan sosiokultural. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja, menurunkan kepuasan pegawai, serta dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Perbedaan kemampuan juga berisiko menurunkan kualitas dan konsistensi prosedur, sehingga dapat berdampak pada jaminan keamanan obat dan makanan.

Berdasarkan data penilaian kompetensi pegawai Balai POM di Dumai hanya 7 orang pegawai yang memiliki nilai optimal, 6 orang masih memiliki nilai cukup optimal dan 3 orang dengan nilai kurang. Sementara itu masih terdapat 10 orang pegawai yang belum dilakukan penilaian manajerial dan sosial kultural.



Untuk itu, upaya mengurangi kesenjangan kompetensi perlu dilakukan melalui pelatihan yang terstruktur, merata, dan berkelanjutan. Kesenjangan dalam kompetensi manajerial dan sosiokultural memengaruhi pelaksanaan pengawasan karena berkaitan dengan soft skills yang membutuhkan waktu dan proses pembinaan melalui mentoring dan coaching. Sementara itu, kompetensi teknis lebih mudah dikembangkan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017. Adanya kesenjangan ini menjadi dasar bagi Balai POM di Dumai untuk merencanakan pengembangan pegawai secara lebih terarah dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya lembaga pengawas yang andal dan terpercaya.

6. Koordinasi Penyediaan Data Terkini Terkait Jumlah, Wilayah Dan Cakupan SPPG Serta Penerima Manfaat MBG, Disertai Dengan Tagging Lokasi Belum Memadai.

Ketersediaan data terkini terkait dengan jumlah, wilayah dan cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi modal utama dalam pelaksanaan pengawasan Balai POM di Dumai. Sumber data tersebut dimiliki oleh Koordinator Wilayah BGN dan harapannya dapat mengalir ke instansi lain yang berkepentingan secara real time dan lengkap. Belum terbangunnya sinergi dan koordinasi yang intensif terkait transfer data ini dapat berakibat pada ketidakakuratan data atau tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan sehingga pengawasan berlangsung tidak efektif dan efisien.

Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dan integrasi data lintas sektor, khususnya pada wilayah kerja Balai POM di Dumai yang meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir, guna memastikan tersedianya basis data yang komprehensif, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pengawasan MBG.

3. PELUANG (*OPPRUNITY*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BPOM untuk memosisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Dumai untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Letak Geografis yang Strategis sebagai Gerbang Distribusi

Wilayah kerja Balai POM Dumai berada di pesisir timur Provinsi Riau, langsung berbatasan dengan Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan dan distribusi penting secara nasional dan internasional. Kota Dumai memiliki pelabuhan besar yang menjadi pintu masuk dan keluar berbagai jenis barang, termasuk produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Hal ini memberikan peluang bagi Balai POM di Dumai untuk:

- a. Menjadi garda depan pengawasan impor dan distribusi lintas daerah
- b. Meningkatkan pengawasan pra-edar dengan intersepsi lebih awal terhadap produk ilegal atau tanpa izin edar
- c. Menjalankan fungsi pengawasan berbasis risiko dengan lebih sistematis
- d. Membuka peluang untuk penguatan pengawasan lintas batas dan kerja sama antarnegara

2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Kemitraan Lintas Sektor

Dalam beberapa tahun terakhir, Balai POM di Dumai aktif membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Dumai, Kabupaten Rohil, dan Kabupaten Bengkalis, termasuk OPD seperti Dinas Kesehatan, Diskoperindag, Dinas Pendidikan, dan Dinas UMKM. Peluang ini memungkinkan:

- a. Penguatan edukasi publik melalui jalur resmi pemerintah daerah
- b. Perluasan cakupan program nasional seperti Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman, dan Sekolah Intervensi Keamanan Pangan
- c. Penguatan regulasi daerah atau peraturan wali kota/bupati dalam mendukung pengawasan obat dan makanan

Dengan dukungan tersebut, Balai POM Dumai tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pembangunan daerah di sektor kesehatan masyarakat.

3. Kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat akan pentingnya pengawasan obat dan makanan

Pemerintah daerah semakin sadar akan pentingnya pengawasan obat dan makanan. BPOM Dumai sebagai lembaga pengawas terus berupaya meningkatkan kesadaran ini melalui sosialisasi dan edukasi. BPOM Dumai juga memberikan andil dalam kinerja pemerintah daerah seperti :

- a. Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah
- b. Meningkatnya standar hidup layak
- c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- d. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Kerja sama antara pemerintah daerah, BPOM, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan melindungi kesehatan masyarakat. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif, masyarakat dan pemerintah daerah dapat berperan sebagai pengawas dan pelapor produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar, sehingga wilayah Dumai menjadi lebih aman dan sehat.

4. Keterbukaan Media Lokal dan Partisipasi Masyarakat

Media lokal dan kanal informasi publik di wilayah Dumai dan sekitarnya sangat terbuka terhadap isu-isu pengawasan dan perlindungan konsumen. Ini menciptakan peluang bagi Balai POM di Dumai untuk:

- a. Menjalinkan kerja sama media dalam penyebaran informasi terkait obat dan makanan
- b. Mendorong pelibatan masyarakat sebagai pengawas partisipatif

Semakin banyak masyarakat yang tahu dan sadar tentang fungsi Balai POM di Dumai, semakin besar pula peluang mereka ikut menjaga lingkungan dari peredaran produk berbahaya.

5. Potensi Kolaborasi Edukasi dengan Komunitas, Akademisi, Masyarakat dan Pelaku Usahan

Balai POM di Dumai memiliki peluang strategis untuk mengembangkan kolaborasi serta memperkuat kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari komunitas, akademisi, masyarakat, hingga pelaku usaha. Kolaborasi dengan komunitas lokal sangat potensial karena mereka memiliki jaringan yang luas, kedekatan sosial, serta kemampuan menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini sulit diakses melalui pendekatan formal. Melalui kerja sama ini, pesan KIE mengenai keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat disampaikan secara lebih interaktif dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Di sisi lain, kemitraan dengan institusi akademik, seperti universitas dan sekolah kejuruan, dapat memperkuat kualitas materi KIE melalui dukungan ilmiah, kajian akademis, serta pengembangan program bersama seperti penelitian terapan, pengabdian masyarakat, atau pelatihan berbasis kampus. Akademisi juga dapat berperan sebagai agen diseminasi pengetahuan yang kredibel dan membantu meningkatkan literasi keamanan pangan dan obat di kalangan generasi muda serta calon tenaga profesional.

Pelibatan masyarakat umum menjadi peluang penting untuk membangun budaya sadar keamanan dan mutu produk. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai risiko cemaran, pentingnya membaca label, serta cara memilih produk yang aman, masyarakat dapat menjadi mitra pengawasan yang aktif dan responsif. Program KIE berbasis komunitas seperti penyuluhan, kampanye publik, dan edukasi digital dapat memperkuat partisipasi tersebut.

Sementara itu, kerja sama dengan pelaku usaha memberikan ruang bagi Balai POM di Dumai untuk mempromosikan kepatuhan regulasi, penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik, serta peningkatan mutu produk secara berkelanjutan. Melalui pelatihan, asistensi teknis, dan forum dialog, pelaku

usaha dapat memahami kewajiban, standar, serta risiko yang dapat muncul apabila persyaratan keamanan dan mutu tidak dipenuhi. Pendekatan kolaboratif ini juga berpotensi menciptakan rantai pasok yang lebih aman dan transparan.

Dengan memperkuat kolaborasi multipihak dan mengoptimalkan berbagai kanal komunikasi, Balai POM di Dumai dapat menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya mendukung peningkatan efektivitas KIE, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, dan memperluas dampak pengawasan demi perlindungan masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

6. Dukungan Pelatihan Penjamah Makanan Bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah Kerja Balai POM di Dumai Guna Mendukung Asta Cita Presiden

Balai POM di Dumai memiliki peluang strategis untuk berperan aktif dalam peningkatan keamanan pangan melalui dukungan pelatihan bagi penjamah makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kerjanya. Peluang ini sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya cita keempat yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan memperkuat kapasitas penjamah makanan dalam hal higiene sanitasi, keamanan pangan, serta penerapan *Good Food Handling Practices*, Balai POM di Dumai dapat berkontribusi nyata dalam upaya pencegahan penyakit akibat pangan dan peningkatan gizi masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi kolaboratif antara Balai POM di Dumai dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Dengan dukungan berkelanjutan terhadap penguatan kapasitas penjamah makanan, Balai POM di Dumai berperan aktif dalam memastikan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat terjamin keamanan dan mutunya, selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

7. Transformasi Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi Fondasi Strategis untuk Lingkungan Kerja yang Unggul, Produktif, dan Berkelanjutan di Balai POM Dumai.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah berevolusi dari sekadar kewajiban hukum menjadi fondasi strategis yang krusial bagi keberlanjutan dan keunggulan kompetitif organisasi. Didukung oleh kerangka hukum nasional yang kuat, seperti UU No. 1 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012, serta standar internasional seperti ISO 45001, K3 merupakan investasi sosial dan ekonomi yang menciptakan lingkungan kerja aman dan melindungi tenaga kerja. Penerapannya yang efektif tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tetapi juga secara signifikan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan reputasi organisasi.

Implementasi K3 yang sukses memerlukan pendekatan sistematis dan proaktif, dengan tulang punggungnya adalah proses Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian (HIRADC). Proses ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola berbagai jenis bahaya—fisik, kimia, biologis, ergonomis, psikososial, dan elektrik—secara terstruktur melalui hierarki pengendalian. Keberhasilan sistem ini bergantung pada komitmen manajemen puncak, keterlibatan aktif seluruh karyawan, penyusunan kebijakan dan prosedur yang jelas, serta pelatihan dan audit yang berkelanjutan untuk membentuk budaya K3 yang hidup.

Pada akhirnya, penerapan K3 pada Balai POM di Dumai merupakan upaya kolektif yang melibatkan seluruh sivitas dan pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan, pegawai, hingga tenaga pendukung. Manfaatnya bersifat komprehensif dan strategis, menciptakan siklus positif yang mendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga. Pegawai yang terlindungi dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat akan mampu menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan dengan lebih fokus, akurat, dan bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya turut menjamin kelancaran pelayanan publik dan keselamatan konsumen. Dengan demikian, K3 terbukti bukanlah sekadar kewajiban operasional, melainkan fondasi strategis yang mendukung terwujudnya Balai POM di Dumai yang kredibel, produktif, dan berkelanjutan dalam mengawal produk terapeutik dan pangan di wilayahnya.

4. TANTANGAN (*THREAT*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Dumai. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai POM di Dumai dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Balai POM di Dumai dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Peredaran Produk Ilegal disepanjang wilayah pengawasan dan perbatasan daerah/negara serta rencana adanya Jalur Transportasi laut (Roro Dumai-Melaka)

Selain memiliki peluang dalam melaksanakan pengawasan di daerah perbatasan, Balai POM di Dumai juga menghadapi tantangan serius berupa masuknya produk ilegal melalui jalur laut dan perbatasan yang menjadi pintu masuk potensial bagi produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jalur laut, khususnya pelabuhan-pelabuhan rakyat dan titik-titik distribusi informal di wilayah pesisir, seringkali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan produk obat dan makanan ilegal, tanpa izin edar, palsu, atau mengandung bahan berbahaya. Kondisi ini menjadi ancaman nyata karena produk-produk tersebut dapat dengan cepat beredar di pasar lokal tanpa melalui proses verifikasi atau pengawasan yang memadai.

Keterbatasan pengawasan di area perbatasan laut, ditambah dengan luasnya wilayah kerja dan banyaknya titik masuk yang tersebar, menyulitkan deteksi dini terhadap peredaran produk ilegal. Di sisi lain, pelaku penyelundupan seringkali memanfaatkan jalur distribusi tidak resmi yang sulit terjangkau oleh pengawasan rutin. Hal ini memperbesar peluang masuknya produk yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Selain aspek geografis, minimnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya legalitas dan keamanan produk, serta adanya permintaan pasar terhadap produk murah dan mudah didapat, turut memperkuat mata rantai peredaran barang ilegal. Kondisi ini semakin menyulitkan upaya pengendalian karena pengawasan tidak hanya harus dilakukan secara teknis, tetapi juga harus disertai edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Tantangan dari masuknya produk ilegal melalui jalur laut dan perbatasan ini berpotensi melemahkan sistem perlindungan konsumen dan menurunkan kepercayaan publik terhadap keamanan produk yang beredar. Oleh karena itu, Balai POM di Dumai perlu terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, otoritas pelabuhan, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan intensitas pengawasan di titik-titik rawan, serta memperluas pengawasan berbasis risiko dengan dukungan data dan teknologi.

2. Penjualan Produk Berisiko Melalui Media Sosial dan *Online*

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Balai POM di Dumai menghadapi ancaman baru yang signifikan, yaitu penjualan produk obat dan makanan berisiko melalui media sosial dan platform perdagangan online. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini lebih memilih berbelanja secara daring telah membuka celah bagi peredaran produk tanpa izin edar, produk palsu, atau bahkan produk yang mengandung bahan berbahaya, tanpa melalui jalur distribusi resmi. Tantangan ini menjadi semakin kompleks karena media sosial dan e-commerce bersifat sangat dinamis, tidak memiliki batas geografis, dan dapat digunakan oleh pelaku usaha ilegal untuk menjangkau konsumen dengan cepat dan luas. Produk-produk tersebut seringkali dikemas secara menarik, disertai klaim-klaim berlebihan, dan dijual dengan harga murah untuk menarik perhatian konsumen. Dalam banyak kasus, produk tidak mencantumkan informasi yang jelas terkait izin edar, komposisi, tanggal kedaluwarsa, atau bahkan alamat produsen.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap risiko produk ilegal yang dijual online masih relatif rendah. Banyak konsumen tergiur oleh harga murah dan promosi yang meyakinkan, tanpa menyadari bahwa produk yang dibeli belum tentu aman untuk dikonsumsi. Kurangnya verifikasi terhadap legalitas produk sebelum membeli menyebabkan peredaran produk berisiko melalui media sosial semakin sulit dikendalikan. Dengan memahami bahwa media sosial dan perdagangan daring telah menjadi saluran utama dalam distribusi produk, Balai POM di Dumai perlu bersinergi secara aktif dengan tim siber, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk mengidentifikasi akun-akun penjual ilegal, menutup jalur distribusi daring yang berisiko, dan meningkatkan edukasi publik sebagai bentuk pencegahan yang berkelanjutan.

3. Rendahnya Kesadaran Sebagian Pedagang dan Pelaku Usaha Mikro terhadap Regulasi

Dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, rendahnya kesadaran sebagian pedagang dan pelaku usaha mikro terhadap regulasi yang berlaku menjadi salah satu ancaman yang nyata bagi Balai POM di Dumai. Meski berbagai upaya pembinaan dan edukasi telah dilakukan, masih banyak pelaku usaha, terutama di sektor informal dan skala kecil, yang belum memahami pentingnya standar keamanan pangan dan perizinan produk yang mereka produksi atau jual.

Rendahnya kesadaran ini menjadi ancaman karena dapat menyebabkan beredarnya produk pangan yang tidak aman, tidak higienis, dan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, terutama jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Produk-produk tersebut biasanya beredar di pasar tradisional, warung kecil, hingga platform online tanpa proses pengawasan yang memadai.

Tantangan ini dapat berdampak luas jika tidak diatasi secara sistematis, karena selain membahayakan konsumen, juga dapat mengganggu daya saing produk lokal yang seharusnya bisa berkembang secara sehat dan legal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan, seperti pendekatan persuasif, pelatihan terpadu, kemitraan dengan dinas terkait, serta edukasi berbasis komunitas.

Dengan memperkuat sinergi antara Balai POM, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping UMKM, maka pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi dapat ditingkatkan. Langkah ini sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang bukan hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga mendorong kemandirian dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyediakan produk yang aman, bermutu, dan legal.

4. Rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil pemeriksaan oleh petugas (pembuatan CAPA).

Dalam menghadapi isu-isu eksternal ini, Balai POM di Dumai perlu mengambil pendekatan yang komprehensif dan berbasis kerjasama. Ini melibatkan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan daerah, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayahnya. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam pengawasan online, pemahaman lintas sektor, dan pemantauan kondisi

geografis juga sangat penting untuk memastikan keamanan produk obat dan makanan bagi masyarakat.

5. Hoaks dan Misinformasi tentang Obat dan Makanan di Media Sosial

Salah satu ancaman signifikan yang dihadapi Balai POM di Dumai dalam pengawasan obat dan makanan adalah maraknya hoaks dan misinformasi tentang produk obat dan makanan yang beredar di media sosial. Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan mudah, namun tidak semua informasi tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hoaks dan misinformasi ini berpotensi menyesatkan masyarakat mengenai keamanan, khasiat, dan penggunaan produk obat dan makanan.

Dampak dari fenomena ini sangat berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas, memicu penggunaan produk yang tidak tepat atau berbahaya, serta menghambat upaya edukasi yang selama ini dilakukan oleh Balai POM. Dalam beberapa kasus, hoaks bahkan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi produk ilegal atau produk yang belum terbukti keamanan dan efektivitasnya, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik.

Balai POM di Dumai harus menghadapi tantangan berat untuk melawan arus informasi negatif dan tidak benar tersebut, apalagi dengan keterbatasan sumber daya untuk memantau dan mengklarifikasi setiap isu yang muncul di berbagai platform media sosial. Selain itu, sifat viral dari informasi hoaks mempercepat penyebarannya, sehingga membutuhkan respons cepat dan tepat agar dampak negatif dapat diminimalkan.

6. Minimnya Infrastruktur yang Mengganggu Mobilitas di Beberapa Wilayah Pengawasan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Balai POM di Dumai dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan adalah minimnya infrastruktur di beberapa wilayah pengawasan, terutama daerah perbatasan dan kawasan terpencil, yang menyulitkan akses petugas pengawas ke lokasi-lokasi strategis. Kondisi geografis wilayah Dumai yang mencakup pesisir dan daerah pinggiran dengan akses transportasi yang terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh titik distribusi obat dan makanan secara optimal.

Minimnya infrastruktur jalan, transportasi publik, serta fasilitas komunikasi di beberapa daerah menyebabkan proses pengawasan menjadi tidak efektif dan kurang intensif. Petugas Balai POM sering kali harus menghadapi kendala waktu dan biaya yang tinggi hanya untuk melakukan inspeksi rutin, pengambilan sampel, atau penindakan terhadap produk yang diduga berbahaya atau ilegal. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam deteksi dini terhadap peredaran produk tidak aman. Selain itu, sulitnya akses ke daerah perbatasan memicu risiko masuknya produk obat dan makanan ilegal yang tidak terkontrol dengan baik. Wilayah perbatasan sering kali menjadi jalur masuk produk tanpa izin edar karena pengawasan fisik yang terbatas dan kurangnya koordinasi antarinstansi di lapangan. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku usaha ilegal untuk menyelundupkan produk berisiko yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Minimnya infrastruktur juga memengaruhi kemampuan Balai POM untuk melakukan edukasi dan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat di wilayah tersebut. Keterbatasan akses membuat penyebaran informasi terkait regulasi dan keamanan produk menjadi kurang merata, sehingga kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan pun cenderung rendah. Untuk mengatasi ancaman ini, Balai POM di Dumai perlu melakukan inovasi dalam pengawasan, seperti memanfaatkan teknologi informasi untuk pengawasan jarak jauh, memperkuat kerja sama dengan aparat desa, pemerintah daerah, serta instansi lain yang memiliki akses lebih baik ke wilayah terpencil. Selain itu, pengembangan infrastruktur secara bertahap oleh pemerintah daerah juga sangat diperlukan agar pengawasan obat dan makanan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

7. Perubahan iklim dan geografis wilayah pengawasan yang tidak dapat diprediksi
Perubahan iklim dan geografis wilayah pengawasan yang tidak dapat diprediksi merupakan salah satu ancaman untuk BPOM. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan pola curah hujan yang ekstrem, intensitas hujan meningkat tajam dalam waktu singkat, sehingga sistem drainase dan saluran air tidak mampu menampung volume air yang datang secara tiba-tiba. Akibatnya, banjir bandang semakin sering terjadi, bahkan di daerah yang sebelumnya jarang tergenang. Selain itu, kantor dan wilayah pengawasan Balai POM di Dumai sering terkena

banjir rob, yang dapat mempengaruhi kegiatan pengawasan maupun aktivitas kantor lainnya.

8. Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*)

Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius dan semakin mendesak bagi pengawasan obat dan pangan di Indonesia. Tren penggunaan antimikroba yang tidak rasional, baik dalam pengobatan manusia, kesehatan hewan, maupun sektor pertanian, akan mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah: terancamnya efektivitas terapi; memperbesar risiko penyebaran penyakit yang sulit ditangani; menurunkan keamanan produk pangan asal hewan dan tanaman yang terpapar antimikroba bahkan menimbulkan kematian. Selain itu, hal ini juga akan berdampak bagi meningkatnya beban biaya kesehatan bagi pemerintah.

Bagi Balai POM di Dumai, AMR bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga merupakan tantangan lintas sektor yang harus dihadapi dengan pendekatan sistemik dan terintegrasi. Dari hasil pengawasan Balai POM di Dumai terdapat 75% penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di wilayah kerja Balai POM di Dumai yaitu Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pengawasan akan menjadi kunci. Langkah strategis yang harus dilakukan antara lain meliputi: (a) penguatan regulasi dan pengawasan post-market terhadap peredaran antibiotik dan antimikroba lainnya, termasuk pelacakan residu pada produk pangan; (b) digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan pelaporan, pelacakan, dan analisis data penggunaan antimikroba di seluruh rantai pasok; (c) kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan one health bersama kementerian terkait, pelaku usaha, dan masyarakat; (e) edukasi dan komunikasi risiko yang masif kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan antimikroba. Tanpa penguatan peran BPOM terutama Balai POM di Dumai di wilayah pengawasan BPOM Dumai sebagai garda depan pengawasan obat dan makanan, AMR dapat menjadi krisis kesehatan nasional yang memperlemah fondasi ketahanan sistem kesehatan dan pangan Indonesia.

9. Masih Tingginya Ketimpangan Gender di Berbagai Sektor

Dengan masifnya kegiatan peningkatan sensitivitas gender yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2022 hingga akhir 2024 serta telah dibuatnya media

pembelajaran asinkron/e-Learning Pengarusutamaan Gender, semakin banyak pegawai baik di level pimpinan dan staf di seluruh fungsi yang memiliki pemikiran yang responsif gender. Pemikiran yang responsif gender akan mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender yang merupakan salah satu mainstreaming dalam RPJMN. Harapannya, dengan seiring berjalannya waktu mulai dari penyusunan kebijakan untuk internal dan eksternal, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan kegiatan diharapkan dapat semakin mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Data terpilah/data gender merupakan salah satu prasyarat dalam pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender. Data tersebut merupakan salah satu data pembuka wawasan yang menjadi landasan untuk menggali kesenjangan gender dalam analisis gender. Dengan belum memadainya ketersediaan data terpilah, maka pelaksanaan analisis gender belum dapat dilakukan secara komprehensif.

Ketimpangan gender yang tinggi berdampak sistemik terhadap efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, seperti adanya ketimpangan akses informasi kritis, perbedaan kebutuhan kesehatan yang kurang diakomodasi, representasi gender di tenaga pengawas dan sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, kesenjangan perlindungan konsumen, dan lain-lain.

Tabel 1.2 Hasil Analisa SWOT Balai POM di Dumai

KEKUATAN (<i>STRENGHT</i>)	KELEMAHAN (<i>IWEAKNESS</i>)
1. Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas dan berkompeten	1. Belum Memiliki Laboratorium Pengujian sesuai Standar 2. Belum Memiliki Gedung Kantor dan Fasilitas Pelayanan Publik yang Sesuai Standar 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Belum Proporsional dengan Luas Wilayah Kerja 4. Rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam
2. Kekuatan Geografis Wilayah Kerja dalam Mendukung Fungsi Pengawasan	
3. Dukungan teknologi dan Sistem Informasi	
4. Kerjasama yang solid dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah	

<p>dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan oleh Bupati/Walikota, Surat Edaran AMR</p> <p>5. Peran Aktif dalam Penyebaran Informasi Obat dan Makanan melalui media sosial dan kolaborasi dengan lintas sektor seperti Diskominfo Kota Dumai dan Kab. Rokan Hilir</p> <p>6. Terdapat unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai POM di Dumai dan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang melakukan pengawasan terhadap tindakan penyuapan dan gratifikasi</p> <p>7. Terdapat tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai POM di Dumai yang telah menerima anugerah keterbukaan informasi publik sebagai Badan Publik Informatif</p> <p>8. Memiliki unit pelayanan publik yang dapat diakses secara luring maupun daring dan telah mendapatkan predikat Pelayanan Prima</p>	<p>menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil pemeriksaan oleh petugas (pembuatan CAPA)</p> <p>5. Belum tersedianya data terpilah/ data gender yang memadai baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan (pelaku usaha, masyarakat, mitra kerja)</p> <p>6. Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama pada aspek manajerial dan sosiokultural</p> <p>7. Koordinasi penyediaan data terkini yang memadai terkait jumlah, wilayah dan cakupan SPPG serta penerima manfaat MBG, disertai dengan tagging lokasi</p>
<p>PELUANG (<i>OPPRUNITY</i>)</p>	<p>TANTANGAN (<i>THREAT</i>)</p>
<p>1. Letak Geografis yang Strategis sebagai Gerbang Distribusi</p> <p>2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Kemitraan Lintas Sektor</p>	<p>1. Peredaran Produk Ilegal disepanjang wilayah pengawasan dan perbatasan daerah/negara serta rencana adanya Jalur Transportasi laut (Roro Dumai-Melaka)</p>

<ul style="list-style-type: none"> 3. Kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat akan pentingnya pengawasan obat dan makanan 4. Keterbukaan Media Lokal dan Partisipasi Masyarakat 5. Potensi Kolaborasi dan penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan Komunitas, Akademisi, Masyarakat dan Pelaku Usaha 6. Dukungan pelatihan penjamah makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah Kerja Balai POM di Dumai guna mendukung Asta Cita Presiden 7. Transformasi Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi Fondasi Strategis untuk Lingkungan Kerja yang Unggul, Produktif, dan Berkelanjutan di Balai POM Dumai. 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Penjualan Produk Berisiko Melalui Media Sosial dan Online 3. Rendahnya Kesadaran Sebagian Pedagang dan Pelaku Usaha Mikro terhadap Regulasi 4. Rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil pemeriksaan oleh petugas (pembuatan CAPA 5. Hoaks dan Misinformasi tentang Obat dan Makanan di Media Sosial 6. Minimnya Infrastruktur yang mengganggu Mobilitas di Beberapa Wilayah Pengawasan 7. Perubahan iklim dan geografis wilayah pengawasan yang tidak dapat diprediksi 8. Resistensi Antimikroba (<i>Antimicrobial Resistance/AMR</i>) 9. Masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor
--	---

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Balai POM di Dumai perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2025-2029. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Balai POM di Dumai lebih optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan, kapasitas Balai POM di Dumai masih perlu dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran, tugas pokok, dan fungsinya agar capaian kinerja dapat semakin membaik sehingga dapat memastikan berjalannya proses

pengawasan Obat dan Makanan secara optimal untuk menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai POM di Dumai dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

a. VISI BPOM 2025-2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Balai POM di Dumai sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu :

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

b. MISI BPOM 2025-2029

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi -Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor

ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran - 88 - aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat

dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Dumai sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

c. Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Balai POM di Dumai sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang Aman dan Bermutu	74,75	76,40	77,75	79,45	80,70
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,60	66,20	69,30	72,70	76,70

4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,40	75,90	77,10	78,50	79,90
5	Terwujudnya Organisasi yang profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,30	96,35	96,40	96,45	96,50

d. Sasaran Kegiatan Balai POM di Dumai

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Dumai, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Dumai akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin

kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah :

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan

menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator :

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Dumai periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	<p>Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</p> <p><i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i></p>	<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i> 	<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> <i>7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<p>10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i></p> <p>11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i></p> <p>12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i></p> <p>13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i></p> <p>14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i></p> <p>15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i></p> <p>16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i></p> <p>Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi</p> <p><i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i></p>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<p>Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i></p>	<p>Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i></p>	<p><i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i></p> <p>Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT</p> <p><i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i></p>
<p>Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing</p>	<p>Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM</p> <p><i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i></p>	<p>Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i></p>	<p>Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu</p> <p><i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i></p>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> <i>1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> <i>2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> <i>3. Jumlah desa pangan aman</i> <i>4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> <i>1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM</i> <i>2. Nilai AKIP UPT BPOM</i> <i>3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM</i> <i>4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i> <i>5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT</i> <i>6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar</i> <i>7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT</i>

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BPOM 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang - 95 - mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BPOM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis Balai POM di Dumai sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	Pengajuan Pengadaan Alat Pengujian Laboratorium	Fungsi Pengujian, Fungsi Tata Usaha
		Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan yang diprioritaskan penelusuran Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)	Fungsi Pemeriksaan
			Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam di fasilitas peredaran	Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Penindakan
			Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha Sarana Distribusi OBA	Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Infokom
			Penyebaran Informasi dan Edukasi kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat terkait bahayanya OBA	Fungsi Infokom

			mengandung BKO	
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindaklanjut hasil pengawasan Balai POM di Dumai	Pendampingan Pelaku usaha berupa desk dan Bimbingan Teknis	Fungsi Pemeriksaan
			Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin	Fungsi Pemeriksaan
		Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingann belum optimal	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan bersama Pemerintah Daerah yang tertuang dalam SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makan	Fungsi Pemeriksaan , Fungsi Infokom
			Pertemuan advokasi dan rapat evaluasi DAK Non Fisik	Fungsi Pemeriksaan , Fungsi Infokom
			Monitoring tindaklanjut kepada lintas sektor	Fungsi Pemeriksaan
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi			

3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan kelompok sasaran secara optimal		Fungsi Infokom
4	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM	Pendampingan Pelaku Usaha UMKM	Fungsi Sertifikasi
			Bimbingan Teknis CCPOB bagi pelaku usaha Pangan Olahan	Fungsi Sertifikasi
			Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMK	Fungsi Sertifikasi
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan CJS	Fungsi Penindakan
			Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala	Fungsi Penindakan
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejatahan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring		Fungsi Penindakan

7	Layanan Publik UPT yang Prima	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat	Tim Reformasi Birokrasi
			Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi seluruh Unit Kerja	Tim Reformasi Birokrasi
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Keterbatasan Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana	Prioritisasi program strategis	Fungsi Tata Usaha
			Optimalisasi pemanfaatan aset yang tersedia	Fungsi Tata Usaha
		Keterbatasan kompetensi SDM pengelola tata kelola	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan SAKIP, SPIP, RB, dan Manajemen Risiko	Fungsi Tata Usaha
			Pembinaan teknis secara berkelanjutan	Fungsi Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik *online* maupun *offline*.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat pada UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk- produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung Badan POM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI DUMAI

Balai POM di Dumai mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dorongan yang kuat pada UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Strategi Balai POM di Dumai mengacu Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Dumai periode 2025-2029, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut :

1. Strategi Penguatan Pengawasan Pre dan Post Market Berbasis Risiko dan Inovasi Digital

Balai POM di Dumai memprioritaskan penguatan pengawasan pre dan post market dengan pendekatan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi informasi. Pengawasan diarahkan pada titik-titik strategis seperti pelabuhan, jalur laut, pasar tradisional, sarana distribusi, serta fasilitas produksi, dengan memperhatikan potensi masuknya produk ilegal dan tidak berizin. Penguatan farmakovigilans dilakukan melalui pemantauan efek samping obat, pengawasan antibiotik, serta pengendalian resistensi antimikroba. Selain itu, Balai POM di Dumai mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan pangan yang disediakan aman,

bermutu, dan layak konsumsi.

2. Strategi Penguatan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Secara Terpadu

Balai POM di Dumai memperkuat fungsi penindakan melalui sinergi pencegahan dan penegakan hukum terhadap peredaran produk ilegal, baik secara luring maupun daring. Penguatan patroli siber dilakukan untuk mengawasi perdagangan Obat dan Makanan di media sosial dan platform digital, sementara operasi lapangan difokuskan pada wilayah rawan peredaran produk ilegal, khususnya jalur pesisir dan perbatasan. Optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam membangun efek jera dan menjaga kepastian hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

3. Strategi Peningkatan *Regulatory Assistance* dan Pendampingan Pelaku Usaha Berbasis UMKM

Balai POM di Dumai mengarahkan strategi pendampingan pelaku usaha pada peningkatan kepatuhan regulasi dengan keberpihakan kepada UMKM. Pendampingan dilakukan melalui fasilitasi perizinan berusaha berbasis risiko, asistensi pemenuhan Cara Produksi yang Baik, serta penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui *penerapan Corrective Action and Preventive Action (CAPA)*. Pendampingan juga diperkuat melalui pelatihan penjamah makanan dan fasilitasi SPPG sebagai bagian dari ekosistem UMKM pangan pendukung Program Makan Bergizi Gratis.

4. Strategi Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengawasan

Balai POM di Dumai mengembangkan sistem pengawasan partisipatif melalui peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat. Edukasi dilakukan secara masif melalui media sosial, media lokal, sekolah, pasar, komunitas, serta program Desa Pangan Aman. Upaya ini diarahkan untuk membangun budaya sadar Obat dan Makanan, meningkatkan kewaspadaan terhadap produk ilegal, serta menghadirkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan melalui pelaporan aktif dan pengawasan bersama.

5. Strategi Penguatan Kolaborasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan

Balai POM di Dumai memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi teknis, akademisi, komunitas, serta pelaku usaha dalam rangka menciptakan sistem pengawasan yang terpadu. Kolaborasi diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan daerah, operasi terpadu lintas sektor, serta kerja sama edukasi dan pembinaan. Sinergi ini menjadi instrumen utama dalam menjangkau wilayah pengawasan yang luas dan kompleks.

6. Strategi Peningkatan Kapasitas SDM, Kualitas Pengujian, Analisis Kebijakan, dan Transformasi Digital

Balai POM di Dumai melaksanakan penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, manajerial, dan sosiokultural untuk menutup kesenjangan kompetensi. Pemenuhan kebutuhan SDM berbasis Analisis Beban Kerja menjadi prioritas untuk menjamin proporsionalitas tugas pengawasan. Di sisi lain, penguatan kualitas pengujian dilakukan melalui perencanaan pembangunan dan pengembangan laboratorium pengujian. Transformasi digital diarahkan pada digitalisasi proses pengawasan, pengaduan, pemetaan risiko, serta penguatan basis data termasuk data terpilah gender sebagai dasar perumusan kebijakan yang inklusif.

7. Strategi Penguatan Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Pengawasan

Balai POM di Dumai memperkuat dukungan manajemen melalui penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penerapan manajemen risiko. Penguatan integritas dilakukan melalui optimalisasi peran Unit Pengendalian Gratifikasi dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan. Penguatan pelayanan publik dilakukan dengan menjaga predikat Pelayanan Prima, penguatan PPID sebagai Badan Publik Informatif, serta pengusulan pemenuhan sarana prasarana dan gedung kantor yang representatif. Penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi bagian dari strategi menjaga produktivitas dan keberlanjutan kinerja pengawasan.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis</p>	<p>Penguatan Pengawasan Pre dan Post Market Berbasis Risiko dan Inovasi Digital</p>
<p>Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama sektor.</p>	<p>Peningkatan Regulatory Assistance dan Pendampingan Pelaku Usaha Berbasis UMKM</p>
<p>Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM lintas Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.</p>	<p>Peningkatan <i>Regulatory Assistance</i> dan Pendampingan Pelaku Usaha Berbasis UMKM Program Makan Bergizi Gratis</p>
<p>Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.</p>	<p>Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengawasan</p>

<p>Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.</p>	<p>Penguatan Kolaborasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan</p>
<p>Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data</p>	<p>Penguatan Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Pengawasan</p>
<p>Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran</p>	<p>Penguatan Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Pengawasan</p>

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Dumai juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Arah Kebijakan dan Strategi tersebut didukung oleh berbagai kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Kegiatan Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
 Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi diatas, Balai POM di Dumai melaksanakan kegiatan “Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia”. Penagwasan yang dilakukan oleh Balai POM di Dumai mencakup

pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

1. Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Dumai
 - Pemeriksaan rutin sarana produksi Obat dan Makanan
 - Pemeriksaan rutin sarana produksi fortifikasi
 - Pemberian rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan

2. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Dumai
 - Pemeriksaan rutin sarana distribusi Obat dan Makanan
 - Pemberian rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
 - Pengawasan Iklan Obat dan Makanan
 - Pengawasan Sarana Distribusi Pangan dalam rangka intensifikasi Pangan pada Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru
 - Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik dalam rangka intensifikasi Kosmetik

3. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Dumai
 - Pengambilan sampel Obat dan Makanan yang sesuai dengan ketentuan

4. Layanan Informasi dan Edukasi serta Penyebaran Informasi terkait Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Dumai
 - Pelaksanaan kegiatan KIE “Datuk Panglima” di pelabuhan RORO

Rupat dan Bengkalis

- Penyebaran Informasi terkait Obat dan Makanan melalui kegiatan “INFOPOM”
- Penyebaran Informasi terkait Retail Pangan
- Sosialisasi terkait Antimikroba Resisten, Penyebaran Informasi terkait Stunting pada Anak
- Penyebaran Informasi Obat dan Makanan melalui SMS Blast

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Dumai

- Pendampingan UMK Pangan Olahan dalam rangka sebagai upaya peningkatan kapasitas UMK Pangan olahan dan pendampingan intensif kepada pelaku UMK pangan olahan hingga PB-UMKU
- Intervensi Desa Pangan Aman yang bertujuan untuk memperkuat keamanan pangan di desa dengan memperluas cakupan keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan kolaborasi lintas sektor
- Intervensi Pasar Aman berbasis Komunitas yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelola pasar, pedagang, dan komunitas pasar dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di lingkungan pasar sehingga tercipta pasar yang aman dan sehat bagi masyarakat
- Intervensi Sekolah dengan PJAS Aman yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran keamanan pangan di sekolah

6. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Dumai

- Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
- Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
- Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

7. Intelijen Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Dumai

- Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor
- Peningkatan Kompetensi Petugas Intelijen Balai POM di Dumai

8. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

- Operasi Penindakan Tindak Pidana Perkara Obat dan Makanan
- Pengelolaan Barang Bukti

9. Pengujian *Rapid Test* Obat dan Makanan

- Pengujian *Rapid Test* obat sesuai dengan ketentuan Balai POM
- Pengujian sampel MBG yang akan diserahkan kepada pihak sekolah

b. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Dumai.

1. Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Balai POM di Dumai

- Pencanangan Zona Integritas Balai POM di Dumai
- Penyusunan Rencana Kerja Pokja Reformasi Birokrasi Balai POM di Dumai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB General untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan RB Tematik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat

2. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan Balai POM di Dumai

- Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan peningkatan pemenuhan aspek-aspek kualitas kinerja pelaksanaan anggaran
- Peningkatan efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah
- Penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS).

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Balai POM di Dumai

- Penyusunan Kebutuhan Pegawai Balai POM di Dumai berdasarkan Analisis Beban Kerja
- Penyusunan Analisa Gap Kompetensi Pegawai Balai POM di Dumai

4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Balai POM di Dumai

- Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan sebagai bentuk kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui pemanfaatan Produk Dalam Negeri, penyelenggaraan perdagangan melalui Sistem Elektronik, penambahan Katalog Sektoral Etalase Konsolidasi Reagen secara nasional serta Digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pada satuan kerja di lingkungan BPOM
- Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang

5. Pengembangan Kompetensi SDM Balai POM di Dumai

- Pengembangan Kompetensi yang dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) yang hadir melalui aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*), dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang Sasaran strategis, indikator kinerja dan target Balai POM di Dumai tahun 2025-2029 terlihat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Rencana Kinerja Tahun 2025 – 2029
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	82,5	83,75	85,00	86,25	87,5
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	27	28	29	30
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00
	Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100

Persentase sampel MBG yang diuji sesuai standar	-	81,00	82,00	83,00	84,00
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94,06	94,50	95,00	95,50	96,00
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,38	94,50	95,38	96,25	97,13
Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	88,82	90,42	92,02	93,62	95,22

	Diawasi sesuai ketentuan					
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13,4	7	9	11	13
	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33	66,67	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60,00	60,00	70,00	70,00	80,00
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,83	86,69	87,55	88,41	89,27
	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2	3	4	5	5

	Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	2	3	3
	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	1	1	1
Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat CPOBA, CPOKB dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	8,00	24,00	44,00	72,00	100,00
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejatahan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	5	5	5
	Indeks Manajemen Risiko UPT	2,70	2,72	2,74	2,76	2,78
	Nilai Pembangunan Zona Integritas	-	75,00	75,16	75,33	75,49

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Dumai 2025-2029 Berdasarkan Program

Program	Alokasi (dalam juta rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Obat dan Makanan	13.274,3	37.931	59.603,7	5.183,3	2.863,9
Program Sarana dan Prasarana BPOM	2.689	3.034,4	3.335,1	3.665,8	4.029,5
Total	15.963,3	40.965,4	62.938,8	8.849,1	6.893,5

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Dumai 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (dalam juta rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	15.963,3	40.965,4	62.938,8	8.849,1	6.893,5
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
Total	15.963,3	40.965,4	62.938,8	8.849,1	6.893,5

BAB V PENUTUP

Renstra Balai POM di Dumai disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Renstra Balai POM di Dumai 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra BPOM secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Renstra Balai POM di Dumai 2025-2029 harus dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Balai POM di Dumai agar dapat memiliki orientasi kerja yang fokus kepada tujuan instansi untuk mewujudkan visi dan misi dalam wujud kerja yang nyata. Program dan kegiatan dalam Renstra Balai POM di Dumai 2025-2029 telah dilengkapi dengan target kinerja yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Renstra Balai POM di Dumai 2025-2029.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI DUMAI



EMI AMALIA

LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025 – 2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
								(Dalam Juta Rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Balai POM di Dumai							14.963,3	40.965,4	62.938,9	8.849,2	6.893,6	Balai POM di Dumai		
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Balai POM di Dumai						13.274,3	37.931,0	59.603,8	5.183,4	2.864,0	Balai POM di Dumai	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												Balai POM di Dumai	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Dumai	82,5	83,75	85,00	86,25	87,5						Balai POM di Dumai
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Balai POM di Dumai	0	27	28	29	30						Balai POM di Dumai
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Dumai	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00						Balai POM di Dumai
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Balai POM di Dumai	100	100	100	100	100						Balai POM di Dumai

5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Dumai	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00						Balai POM di Dumai
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Balai POM di Dumai	94,06	94,50	95,00	95,50	96,00						Balai POM di Dumai
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Dumai	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00						Balai POM di Dumai
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Dumai	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00						Balai POM di Dumai
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Dumai	93,38	94,50	95,38	96,25	97,13						Balai POM di Dumai
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Dumai	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00						Balai POM di Dumai
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Balai POM di Dumai	88,82	90,42	92,02	93,62	95,22						Balai POM di Dumai

12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Balai POM di Dumai	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						Balai POM di Dumai
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Balai POM di Dumai	100	100	100	100	100						Balai POM di Dumai
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai POM di Dumai	13,4	7	9	11	13						Balai POM di Dumai
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Balai POM di Dumai	33,33	66,67	100	100	100						Balai POM di Dumai
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Dumai	0	81,00	82,00	83,00	84,00						Balai POM di Dumai
RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			0	25	30	35	40						Balai POM di Dumai

RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		124	124	125	128	134						Balai POM di Dumai
RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		322	326	344	360	381						Balai POM di Dumai
RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		30	32	35	38	42						Balai POM di Dumai
RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		119	135	147	159	175						Balai POM di Dumai
RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		0	144	144	144	144						Balai POM di Dumai
RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		1	1	1	0	0						Balai POM di Dumai
RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						Balai POM di Dumai
RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	1	1	1	1						Balai POM di Dumai
RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	255	255	255	255						Balai POM di Dumai

	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi												Balai POM di Dumai
1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Dumai	60	60	70	70	80						Balai POM di Dumai
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		6	6	7	7	8						Balai POM di Dumai
	Meningkatnya efektivitas KIE												Balai POM di Dumai
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Balai POM di Dumai	85,83	86,69	87,55	88,41	89,27						Balai POM di Dumai
2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai POM di Dumai	2	3	4	5	5						Balai POM di Dumai
3	Jumlah desa pangan aman	Balai POM di Dumai	1	1	2	3	3						Balai POM di Dumai
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Balai POM di Dumai	1	1	1	1	1						Balai POM di Dumai
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		158	1.000	1.050	1.100	1.150						Balai POM di Dumai

	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		28	10	12	13	15						Balai POM di Dumai
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	3	4	5	5						Balai POM di Dumai
	RO 4: Desa Pangan Aman		1	1	2	3	3						Balai POM di Dumai
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		1	1	1	1	1						Balai POM di Dumai
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu												Balai POM di Dumai
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Balai POM di Dumai	8,00	24,00	44,00	72,00	100						Balai POM di Dumai
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		2	4	5	7	7						Balai POM di Dumai
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												Balai POM di Dumai
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Balai POM di Dumai	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00						Balai POM di Dumai

	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		1	2	2	2	2						Balai POM di Dumai
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												Balai POM di Dumai
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Balai POM di Dumai	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						Balai POM di Dumai
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		14	14	15	5	5						Balai POM di Dumai
	Layanan Publik UPT yang prima												Balai POM di Dumai
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Balai POM di Dumai	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15						Balai POM di Dumai
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		14	18	22	24	26						Balai POM di Dumai
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal												Balai POM di Dumai
1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai POM di Dumai	0	75,00	75,16	75,33	75,49						Balai POM di Dumai
2	Nilai AKIP UPT BPOM	Balai POM di Dumai	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00						Balai POM di Dumai

	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Balai POM di Dumai	5	5	5	5	5						Balai POM di Dumai
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Balai POM di Dumai	2,7	2,72	2,74	2,76	2,78						Balai POM di Dumai
	5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Balai POM di Dumai	100	100	100	100	100						Balai POM di Dumai
		RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		1	1	1	1	1						Balai POM di Dumai
		RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		1	1	1	1	1						Balai POM di Dumai
		RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		1	1	1	1	1						Balai POM di Dumai
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			Balai POM di Dumai						1.689,0	3.034,4	3.335,1	3.665,8	4.029,6	Balai POM di Dumai
		RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						Balai POM di Dumai
		RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						Balai POM di Dumai

Terdapat penurunan target dari tahun 2025 ke 2026 untuk indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

Hal ini dikarenakan Balai POM di Dumai mengalami peningkatan status dari Loka menjadi Balai di pertengahan tahun 2025, sehingga Tools yang digunakan dalam nilai pemenuhan Lab di tahun 2026-2029 menggunakan Tools Balai/ Laboratorium Tingkat 2.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
DUMAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Emi Amalia'.

EMI AMALIA